

repository.ub.ac.id

# **PEMBANGUNAN AKSES INFORMASI MASYARAKAT PERBATASAN MELALUI PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

(Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Kornelia Bernadecta Lie**

**145030601111001**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

## **MOTTO**

**“JADILAH GARAM DAN TERANG DUNIA”**

**MATIUS 5 : 13-16**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PEMBANGUNAN AKSES INFORMASI MASYARAKAT  
 PERBATASAN MELALUI PEMBANGUNAN JARINGAN  
 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Studi di Dinas  
 Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,  
 Kalimantan Barat)

Disusun oleh : Kornelia Bernadecta Lie  
 NIM : 145030601111001  
 Fakultas : Ilmu Administrasi  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Malang, 3 Mei 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Niken Lastiti V.A, S.AP,M.AP  
 NIP 198102 10 2005 01 2 002

Anggota

Rendra Eko Wismanu, S.AP,M.AP  
 NIP 2011078512141001

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

- Hari : Selasa
- Tanggal : 22 Mei 2018
- Jam : 09.00 – 10.00 WIB
- Skripsi Atas Nama : Kornelia Bernadecta Lie
- Judul : Pembangunan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan Melalui Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi (Studi di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Niken Lastiti VA, S.AP,M.AP**  
NIP. 198102102005012002

Anggota

**Rendra Eko Wismanu, S.AP,M.AP**  
NIP. 2011078512141001

Anggota

**Drs. Heru Ribawanto, M.S**  
NIP. 195209111979031002

Anggota

**Drs. Sukanto, M.S**  
NIP. 195912271986011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain. Kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 3 Mei 2018  
Mahasiswa

Kornelia Bernadecta Lie

## RINGKASAN

Kornelia Bernadecta Lie, 2018, **Pembangunan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan Melalui Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika (Studi di Dinas Telekomunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)** Niken Lastiti V.A.,S.AP,M.AP, Rendra Eko Wismanu S.AP,M.AP. 165 Hal + xx

---

Penelitian ini bermula dari tidak meratanya pembangunan sarana infrastruktur di daerah perbatasan Indonesia. Pembangunan yang tidak merata di daerah perbatasan menyebabkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut menjadi tertinggal. Sehingga, hal ini yang menyebabkan semakin bertambahnya wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di daerah perbatasan. Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana pembangunan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Nawacita Presiden. Nawacita Presiden berisi misi-misi pembangunan salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggir. Hal inilah yang mengawali pembangunan daerah pinggiran atau perbatasan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika bersama pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pembangunan berupa membuka akses komunikasi dan informasi. Pembukaan akses informasi dan komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dibidang komunikasi dan informasi agar dapat berkembang dan terlepas dari isolasi. Selain itu, di wilayah perbatasan terdapat area yang tidak memiliki sinyal atau *Blankspot Area*. Pembangunan akses komunikasi dan informasi tersebut berupa pembangunan tower mini BTS (*Base Transceiver Station*). Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembangunan akses informasi di perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses pembangunan akses informasi melalui penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika serta mengidentifikasi dampak pembangunan akses informasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah proses tahapan perencanaan dalam pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampak dari pembangunan kapasitas masyarakat. Model penelitian dalam menganalisis data dengan menggunakan model Miles Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan tahapan perencanaan dalam pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran. Selama proses penyediaan terdapat faktor pendukung berupa teknologi, dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah. Faktor penghambat berupa teknologi, partisipasi masyarakat dan partisipasi pemerintah. Sedangkan dampak dari pembangunan akses informasi melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika yaitu terbukanya akses komunikasi dan informasi serta berkurangnya wilayah *Blankspot Area* (wilayah tidak memiliki sinyal)

Kata Kunci: Akses Informasi, masyarakat, masyarakat, telekomunikasi dan informatika, Kapuas Hulu

## SUMMARY

Kornelia Bernadecta Lie, 2018 **Information Access Development Of Border Community Through Supplying Telecommunication and Information (Studi at Telecommunication, Informatics and Statistics Office of Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan** Niken Lastiti V.A.,S.AP,M.AP, Rendra Eko Wismanu S.AP,M.AP.  
165 Page + xx

---

This research starts from the uneven development of infrastructure in the border area of Indonesia. Uneven development in the border region caused the existing community in the region being left behind. So, this is causing a growing increase of the area of 3T (terdepan, terluar, tertinggal) in the border areas. Government as the author and executor of development expected to resolve these problems. Based on such matters in the year 2014 President Joko Widodo issued a Nawacita President. Nawacita President contains development missions one is build indonesia from the edge. This initiated the construction of the suburban areas or border that existed in Indonesia. Based on the foregoing, the DWT. Telecommunications and Informatics of the Ministry of property along the local government County of Kapuas Hulu do development in the form of open access to communication and information. The opening of the access to information and the communication aims to provide facilities to the community in the field of communication and information in order to thrive and in spite of the isolation. In addition, in the border region there are areas that do not have Blankspot or Ligt Area. Development of the communication and information access in the form of the construction of the Tower mini BTS (Base Transceiver Station). This research aims to describe the development process of information access in the border county of Kapuas Hulu, identify supporters and restricting information access development process through the provision of telecommunications networks and informatics as well as identify the impacts of the construction of information access Regency Kapuas Hulu.

This research is descriptive research using qualitative approach to techniques of data collection include interviews, field observations of interviewees and documentation. The focus of this research is a process planning in development stages, factors that affect and impact of capacity building of the community. Model research in analyzing data by using models, Miles and Huberman Saldana.

The results of this study showed that the process of the provision of telecommunications networks and Informatics in the Regency Kapuas Hulu using the planning stages in development include the planning, implementation and budgeting. During the process of providing the there is a supporting factor in the form of technology, community support and Government support. Restricting factors in the form of technology, community participation and the participation of the Government. While the impact of the construction of the access to information through the development of telecommunication networks and Informatics applies the openness of access to communication and information as well as the reduced territory of Blankspot Area (the region has no Ligt)

Keywords: access Information, community, society, telecommunications and Informatics, Kapuas Hulu

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Tuhan Maha Kuasa atas berkat dan limpahan kasih yang diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis persembahkan penelitian ini kepada:

1. Papa (Firdaus Lie) , Mama (Elisabet Nuliana) , Kak Nia Christie, Fulgentia Selvie dan Marie Louise yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan penuh kepada penulis
2. Sahabat terbaik Viani Toda, Natasha Airin Larasati, Fitriana Hanarti, Putu Rizky Marlinda Utami Giri, dan Trisa Inggir Prawita Yulanti yang telah mendampingi dan mendukung dalam pengerjaan skripsi ini
3. Seluruh teman-teman perencanaan pembangunan 2014 yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini.
4. Keluarga Besar KMK FIA ANGELUS yang telah mendukung dan menjadi keluarga selama ini.

Malang, 3 Mei 2018

Penulis

Kornelia Bernadecta Lie



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembangunan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan Melalui Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika (Studi di Dinas Telekomunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik dengan minat Perencanaan Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis tentunya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Hermawan, M.Si selaku ketua minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Prodi Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Niken Lastiti V.A.,S.AP.,M.AP selaku ketua komisi pembimbing skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. Bapak Renda Eko Wismanu S.AP, M.AP selaku anggota komisi pembimbing skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi
7. Bapak Julkipli S.H,M.AP selaku Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika yang telah memberikan bantuan dan informasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
8. Bapak Sutik S.T selaku kepala divisi Statistik dan Bapak Muhammad Yamin selaku kepala divisi Aplikasi Informatika yang telah memberikan bantuan dan informasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
9. Bapak Yohanes Kelen selaku Sekretaris Desa Lauk yang telah memberikan bantuan dan banyak informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Masyarakat Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin yang telah memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kontribusi Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Administrasi Publik .....	11
2.1.1 Definisi Administrasi Publik .....	11
2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik .....	12
2.2 Administrasi Pembangunan .....	13
2.2.1 Definisi Administrasi Pembangunan .....	13
2.2.2 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan .....	15
2.3 Akses Informasi .....	17
2.3.1 Definisi Akses Informasi .....	17
2.3.2 Sistem Informasi Manajemen .....	19
2.4 Masyarakat Perbatasan .....	22
2.4.1 Definisi Masyarakat Daerah Perbatasan .....	22

2.4.2 Kondisi Masyarakat Daerah Perbatasan.....	23
2.5 Jaringan Telekomunikasi dan Informasi .....	24
2.5.1 Definisi Jaringan Telekomunikasi dan Informasi .....	24
2.5.2 Peran Jaringan Telekomunikasi dan Informasi .....	26
2.6 <i>Electronic Government</i> .....	28
2.6.1 Definisi <i>Electronic Government</i> .....	28
2.6.2 Jenis <i>Electronic Government</i> .....	29

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Fokus Penelitian .....	31
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian .....	34
3.4 Jenis Data .....	34
3.4.1 Jenis Data .....	34
1. Data Primer .....	34
2. Data Sekunder .....	35
3.5 Sumber Data.....	34
3.5.1 Informan .....	36
3.5.2 Peristiwa .....	36
3.5.3 Dokumen .....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6.1 Wawancara .....	38
3.6.2 Observasi .....	38
3.6.3 Studi Dokumentasi .....	39
3.7 Instrumen Penelitian.....	39
3.7.1 Peneliti Sendiri .....	39
3.7.2 Pedoman Wawancara .....	40
3.7.3 Perangkat Penunjang .....	40
3.8 Metode Analisis Data.....	41
3.9 Keabsahan Data.....	43

## BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1	Kabupaten Kapuas Hulu .....	45
	1. Kondisi Geografis .....	45
	2. Jumlah Penduduk dan Sebarannya .....	47
	3. Peta Organisasi .....	48
4.1.2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ....	48
	1. Visi .....	49
	2. Misi .....	49
	3. Struktur Organisasi .....	50
	4. Kinerja Pelayanan .....	61
4.1.3	Desa Lauk .....	74
	1. Kondisi Geografis .....	74
	2. Jumlah Penduduk .....	75
	3. Struktur Pemerintah Desa .....	76
	4. Fasilitas Komunikasi dan Informasi .....	76
	5. Potensi.....	77
4.1.4	Desa Sungai Uluk Palin .....	78
	1. Kondisi Geografis .....	78
	2. Jumlah Penduduk .....	79
	3. Struktur Pemerintah Desa .....	80
	4. Fasilitas Komunikasi dan Informasi .....	80
	5. Potensi .....	81
4.2	Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	82
1.2.1	Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi .....	82
	1. Proses Pembangunan .....	83
	2. Penyediaan Sumber Daya .....	107
	3. Peran <i>Stakeholder</i> .....	111
1.2.2	Faktor Mempengaruhi Penyediaan Akses Informasi Masyarakat.....	117
	1. Faktor Pendukung .....	117
	2. Faktor Penghambat .....	121
1.2.3	Dampak Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika .....	127

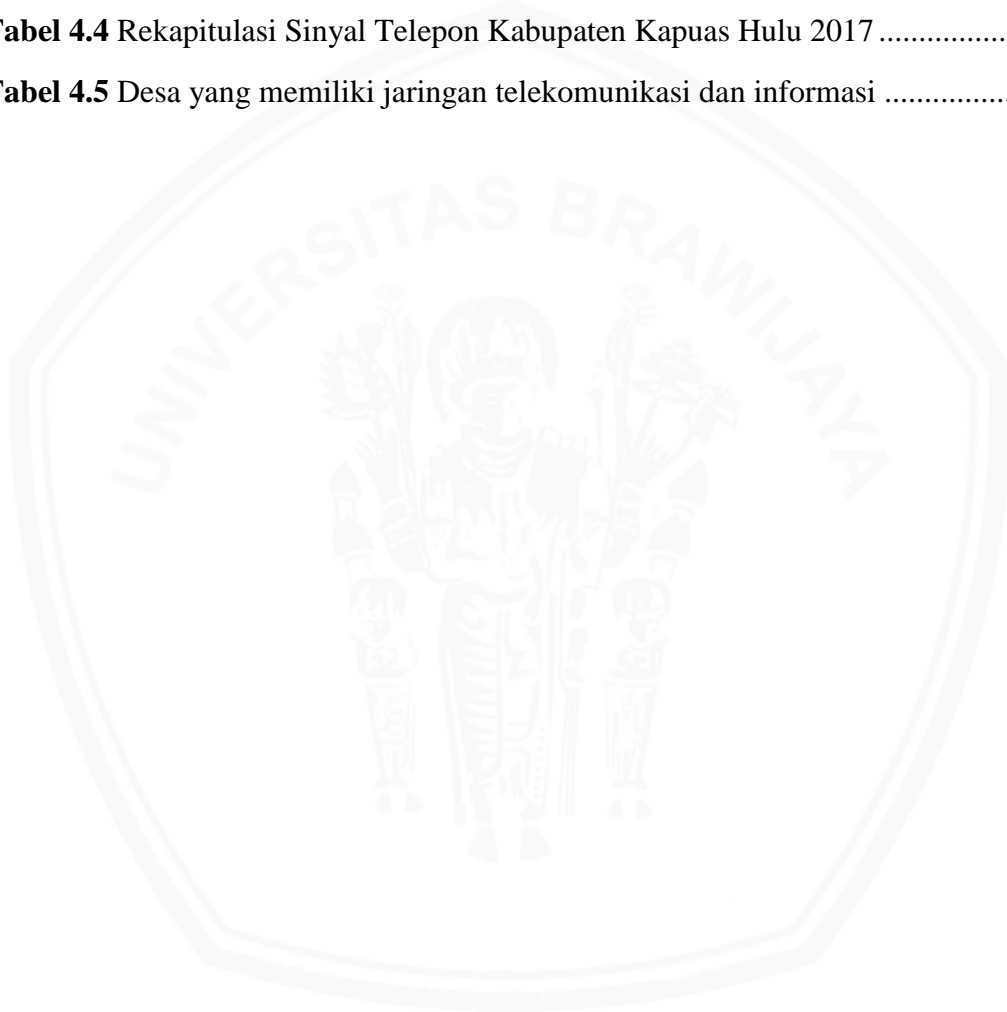
1. Dampak Positif .....	128
2. Dampak Negatif .....	131
4.3 Analisi Data .....	134
4.3.1 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi .....	134
4.3.2 Faktor Mempengaruhi .....	137
1. Faktor Pendukung .....	137
2. Faktor Penghambat .....	142
4.3.3 Dampak Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika .....	145
1. Dampak Positif .....	145
2. Dampak Negatif .....	147
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	149
5.2 Saran/Rekomendasi .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xvii</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	42
<b>Gambar 4.1</b> Peta Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu .....	47
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	48
<b>Gambar 4.3</b> Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu .....	50
<b>Gambar 4.4</b> Struktur Organisasi Desa Lauk.....	76
<b>Gambar 4.5</b> Struktur Organisasi Desa Sungai Uluk Palin .....	80
<b>Gambar 4.6</b> Persyaratan Pengajuan Proposal BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> ) .....	92
<b>Gambar 4.7</b> Musyawarah tentang tanah hibah Desa Lauk.....	101
<b>Gambar 4.8</b> Bangunan BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> ) Desa Lauk .....	102
<b>Gambar 4.9</b> Bangunan BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> ) Desa Sungai Uluk Palin .....	104
<b>Gambar 4.10</b> Sinyal di Desa Lauk .....	124
<b>Gambar 4.11</b> Siklus Perencanaan.....	134

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Lokasi yang akan dibangun BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> ) .....	96
<b>Tabel 4.2</b> Daftar BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> ) yang sudah terbangun dari tahun 2016-2017 .....	105
<b>Tabel 4.3</b> Rekapitulasi Sarana Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu .....	108
<b>Tabel 4.4</b> Rekapitulasi Sinyal Telepon Kabupaten Kapuas Hulu 2017 .....	109
<b>Tabel 4.5</b> Desa yang memiliki jaringan telekomunikasi dan informasi .....	130



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b> Nawacita Presiden 2014 - 2019 .....	152
<b>Lampiran 2</b> Pedoman Wawancara .....	153
<b>Lampiran 3</b> Biodata Narasumber .....	157
<b>Lampiran 4</b> Surat Pengantar Izin Riset .....	163
<b>Lampiran 5</b> Rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur .....	164
<b>Lampiran 6</b> Rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kapas Hulu .....	165





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Administrasi publik merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang di kehendaki rakyat melalui pemerintah (Dimock & Dimock 1992:20). Sehingga Administrasi publik dapat di katakan sebagai proses pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat kemudian mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dapat di lakukan dengan Pembangunan. Pembangunan menurut Riyadi dan Deddy Bratakusumah (2005) dikutip oleh Said (2012:5-12) adalah suatu kesepakatan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, Ginanjar Kartasasmita (1994) yang dikutip oleh Said (2012:5) memberikan pengertian sederhana, pembangunan yaitu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang di lakukan secara terencana. Sejalan hal tersebut, Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi atau perubahan ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Haryono (2012 :32), pada dasarnya administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang “*commit*” terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian

tujuan-tujuan pembangunan atau dengan kata lain administrasi publik yang lebih di tujukan untuk mendukung proses pembangunan.

Fokus pembangunan Indonesia berdasarkan Agenda Pembangunan Nasional Kementerian Telekomunikasi dan Informatika yaitu berfokus pada delapan indikator antara lain Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Perbatasan, Kedaulatan Pangan, Energi, Kemaritiman, Pariwisata dan Industri. Agenda Pembangunan Nasional Kementerian Telekomunikasi dan Informatika berawal dari adanya Nawacita Presiden 2014-2019. Nawacita Presiden terdiri dari sembilan Indikator Pembangunan Nasional yang kemudian di terjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl 2015-2021 (RPJMN 2015-2021). Kemudian, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl 2015-2021 tersebut Kementerian Telekomunikasi dan Informatika membuat Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun bentuk penyelenggaraan Pembangunan Nasional adalah penyediaan infrasturktur berupa sarana telekomunikasi dan informatika pada daerah perbatasan. Pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika di wilayah perbatasan yang di fasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk mengatasi kesenjangan di wilayah Indonesia. Kesenjangan tersebut terjadi karena tidak seimbangnya pertumbuhan teknologi dan informasi di Indonesia. Permasalahan ini di pengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah. Selain itu, pembangunan tersebut untuk mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi disebabkan luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan

penyebaran pendudukan yang tidak merata sehingga berpengaruh pada penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi.

Rencana Strategis Kementerian Telekomunikasi dan Informatika 2015-2019 salah satunya berisi penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika di prioritaskan untuk daerah perbatasan. Daerah Perbatasan menjadi prioritas karena daerah perbatasan merupakan penggerak perekonomian serta memberikan pengaruh pada aspek lain seperti pada aspek sosial dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa daerah perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Wilayah perbatasan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Peranan wilayah perbatasan sebagai fungsi keamanan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian nasional, regional, dan internasional. Hal inilah yang melatarbelakangi pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika menjadikan daerah perbatasan sebagai prioritas dalam pembangunan.

Pembangunan sarana jaringan telekomunikasi dan informasi di daerah perbatasan berupa bangunan *tower mini* yaitu *Base Transceiver Station (BTS)*. *Base Transceiver Station (BTS)* adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. *Base Transceiver Station (BTS)* merupakan bagian dari *Base Station Subsystem* untuk sistem manajemen. *Base Transceiver Station (BTS)* berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain. *Base Transceiver Station (BTS)* dibangun berdasarkan usul pemerintah daerah melalui kerjasama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Pemerintah Daerah, perusahaan

penyediaan transmisi, power dan tower serta operator selular. Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) menggunakan mekanisme sewa layanan dimana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) membiayai penyediaan transmisi, power dan tower serta operator selular. Sedangkan Pemerintah Daerah meminjamkan lahan untuk pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Peran dari operator selular adalah untuk menyediakan dan mengoperasikan perangkat BTS. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) bertujuan untuk mengurangi wilayah *blankspot* yang ada di daerah perbatasan Indonesia. Wilayah *blankspot* merupakan suatu wilayah yang tidak memiliki akses informasi dan telekomunikasi. Daerah perbatasan yang memiliki wilayah *blankspot* di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika, Kabupaten Kapuas Hulu, dari 282 desa di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 147 desa yang merupakan wilayah *blankspot* (tidak memiliki sinyal komunikasi).

Daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu selain memiliki 147 wilayah *blankspot*, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah strategis dengan berbagai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Adapun beberapa potensi yang di miliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah bidang pertanian, industri, perhotelan dan pariwisata. Namun, potensi pada bidang-bidang tersebut belum dikembangkan dengan baik. Padahal melalui pengembangan bidang-bidang tersebut dapat membangun perekonomian. Oleh karena itu, dengan adanya penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika di harapkan mampu untuk menghidupkan potensi pada bidang-bidang tersebut dengan maksimal. Selain itu melalui pembukaan akses informasi masyarakat perbatasan, pemanfaatan penyediaan

jaringan telekomunikasi dan informasi adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya lanjutan untuk mengembangkan daerah perbatasan karena pembangunan bukan hanya diartikan sebagai pembangunan fisik, namun dapat berupa pembangunan sumber daya termasuk di dalamnya pembangunan manusia. Proses Pembangunan sumber daya manusia menurut Soetomo (2008:35) dapat di artikan sebagai proses pembangunan kapasitas. Grindle (1977) dalam Haryono (2012:19) mendefinisikan pembangunan kapasitas atau *Capacity building* sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok dan organisasi melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi, dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok, atau organisasi dapat bertahan serta mampu mengatasi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga.

Pembangunan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah melalui Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Adapun pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dilakukan pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil). Selain itu, berdasarkan Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa dalam pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) terfokus pada wilayah yang belum memiliki sinyal atau *blankspot area* serta belum memiliki sarana telekomunikasi dan informasi di wilayahnya. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan sejak 2016 pada 10 Desa. Sedangkan pada tahun 2017 telah terbangun pada 9 Desa. Total pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) pada tahun 2016 sampai 2017 adalah 9 Desa. Sejak terbangun pada tahun 2016 hingga 2017 *Base Transceiver Station* (BTS) telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan informasi

dan komunikasi masyarakat. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) Sejak terbangun 2016 masyarakat merasakan kemudahan dalam berkomunikasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Jumaisiah. Ibu Jumaisiah berpendapat bahwa semenjak terbangunnya *Base Transceiver Station* (BTS) di Desa Sungai Uluk Palin mereka menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi dan memperoleh komunikasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Kelen sekretaris sekaligus warga Desa Lauk bahwa pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) mempermudah mereka dalam berkomunikasi, membantu segala urusan menjadi lebih cepat jika dibanding sebelum adanya *Base Transceiver Station* (BTS) mereka sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan informasi pada suatu wilayah merupakan hal penting terutama dalam hal pembangunan. Pembukaan akses informasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat berkembang dan terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul **Pembangunan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan Melalui Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika**. Sehingga peneliti dapat menjabarkan proses pembangunan akses informasi masyarakat melalui penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi di Daerah Perbatasan pada Kabupaten Kapuas Hulu, mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta dampak pembangunan akses informasi bagi masyarakat sebagai hasil dari pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi sebagai upaya penyediaan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Pembangunan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu ?
3. Apa dampak dari Pembangunan Akses Informasi melalui penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika terhadap masyarakat perbatasan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan proses penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Kapuas Hulu
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pembangunan akses informasi masyarakat perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan akses informasi melalui penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika terhadap masyarakat perbatasan

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Adapun Kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Praktis

Kontribusi penelitian ini pada aspek praktis adalah agar hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan akses informasi di daerah perbatasan. Sehingga untuk kedepannya pembangunan akses informasi di daerah perbatasan dapat terlaksana lebih baik dan di manfaatkan secara maksimal.

2. Aspek Teoritis

Kontribusi penelitian ini pada aspek teoritis adalah bentuk perwujudan dari teori pembangunan masyarakat. Sehingga dapat menunjukkan bahwa teori pembangunan masyarakat terutama di bidang telekomunikasi dan informasi semakin berkembang.

#### 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal penelitian berikut ini terdiri dari lima bab, yang pada masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab, sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Memuat pendahuluan yang terdiri atas, latar belakang masalah yang berisi mengenai pentingnya peneliti mengangkat judul penelitian ini. Rumusan masalah yang digunakan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Kemudian tujuan penelitian dan kontribusi penulisan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka meliputi administrasi publik, administrasi pembangunan, akses informasi, masyarakat perbatasan, jaringan telekomunikasi dan informasi, dan *electronic government*.

## BAB III METODE PENELITIAN

Peneliti menjelaskan mengenai instrumen yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian. Meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data dan metode analisis data.

## BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan berisi penjabaran hasil penelitian yang di bagi menjadi empat bab berupa gambaran umum Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Lauk dan Desa Sungai Utik. Kemudian, Penyajian dan Fokus Penelitian berupa penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika, Dampak Penyediaan jaringan telekomunikasi dan Informatika, serta faktor penghambat dan faktor pendukung. Serta sub bab terakhir pada bagian ini yaitu Analisis hasil penelitian berupa penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika, faktor penghambat dan pendukung serta dampak terhadap masyarakat melalui penyediaan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB V PENUTUP

Bab penutup terbagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berisi hasil dari penelitian secara menyeluruh. Sedangkan rekomendasi adalah masukan dari penulis untuk menanggapi permasalahan yang ditemui dalam penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Administrasi Publik

##### 2.1.1 Definisi Administrasi Publik

Dimock & Dimock (1992:20) mendefinisikan bahwa Administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang di kehendaki rakyat melalui pemerintah, dan mereka yang memperolehnya. Caiden (1982) mengemukakan Ilmu administrasi publik pada hakekatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public bussiness*). Sedangkan, Waldo (1971) administrasi publik adalah suatu daya upaya yang *kooperatif*, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Selanjutnya menurut Siagian (1994:3) Administrasi Publik adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimock, Dimock, dan Koenig (1960) juga mengungkapkan pendapat mengenai Administrasi publik merupakan kegiatan pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan politiknya, dimana kaitan antara proses politik dan pelaksanaannya disebut sebagai Administrasi Publik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Administrasi publik adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat kemudian

mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan proses mempelajari pemerintahan secara luas, yaitu meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terkait dengan masalah publik. Adapun masalah publik meliputi tiga hal yaitu; kebijakan publik, tujuan negara, dan etika dalam tata cara penyelenggaraan negara. Syafiie, Tanjung dan Modeong (2006: 24-25) mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut :

1. Administrasi publik berupa implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Administrasi publik merupakan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
3. Administrasi publik adalah sebuah proses yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, mengarah pada kecakapan teknologi dan menunjukkan arah dan tujuan dari suatu pemerintahan.

Berdasarkan definisi tersebut, administrasi publik berkaitan dengan kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah. Administrasi publik bukan hanya mengenai aktivitas negara namun definisi administrasi dapat di arahkan pada kepentingan masyarakat melalui pelaksanaan dari administrasi publik tersebut. Thoha (2008 : 52-53) Administrasi Publik telah terjadi pergeseran dari *Administration of Public* yaitu negara sebagai agen tunggal dalam implementasi fungsi pemerintahan kemudian berubah

menjadi *Administration by Public* yaitu aktivitas negara merupakan oleh, untuk dan kepada masyarakat. Sehingga di dalamnya tidak lagi menitikberatkan kepada “otoritas” namun pada “kompatibilitas” di antara para aktornya yaitu *state* (pemerintah), *civil society* (masyarakat), dan *privat sector* (sektor swasta). Oleh karena administrasi publik menitikberatkan pada masyarakat artinya ruang lingkup dalam suatu pemerintahan yaitu menjadikan masyarakat sebagai prioritas dari pemerintah yaitu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat.

## 2.2 Administrasi Pembangunan

### 2.2.1 Definisi Administrasi Pembangunan

Siagian (1999:4), Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi dan (2) pembangunan. Administrasi adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Sedangkan, pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian usaha pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar ditempuh untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Selanjutnya, Siagian (1999:5) Administrasi pembangunan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berusaha secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Administrasi pembangunan berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan-

perubahan ke arah yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan. Selanjutnya, Tjokjoamidjojo (1987), mengatakan administrasi pembangunan mempunyai ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Administrasi pembangunan memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda, terutama masyarakat yang baru berkembang. Weider (1962) dikutip oleh Haryono (2012:32) mengemukakan Administrasi pembangunan adalah sebagai berikut :

*Development administration : public administration with a special purpose. Administration with the objective of political, economic and social development. Development administrations is the process of guiding an organizing to ward the achievement of development obyectives. It is action oriented, and it places administration at the center in facilitating the attainment of development obyectives.* (Administrasi pembangunan : administrasi publik dengan tujuan yang istimewa, Administrasi dengan sasaran politik, ekonomi, dan pembangunan sosial. Administrasi pembangunan adalah proses penuntutan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Berorientasi pada tindakan, dan menempatkan administrasi sebagai poros dalam pencapaian tujuan).

Pada dasarnya administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang “commit” terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan atau dengan kata lain administrasi publik yang lebih di tujukan untuk mendukung proses pembangunan (Haryono , 2012:32). Ruang lingkup administrasi pembangunan adalah penyempurnaan administrasi negara dan penyempurnaan administrasi bagi penyelenggara proses pembangunan. Ruang lingkup administrasi pembangunan dengan jelas mengatakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai kaitan yang erat dengan administrasi publik, bahkan administrasi pembangunan saling mempengaruhi dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang dapat berperan sebagai

“*agent of change*” atau dalam istilah Leemans, disebut sebagai “*Management of change*” (Haryono, 2012:33).

Ciri pokok administrasi pembangunan adalah mendorong proses perubahan atau pembaharuan ke arah yang dianggap lebih baik. Kriteria dasarnya, seperti yang dikemukakan oleh Abdullah (1985) dalam Haryono (2012:33) yaitu a. pembangunan kapasitas; b. transfer teknologi; c. Transfer nilai; dan d. partisipasi termasuk pemerataan. Administrasi pembangunan mencakup penyelenggaraan mulai dari perumusan kebijakan sampai pada implementasinya. Selain itu, administrasi pembangunan memikirkan bagaimana suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan baik segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik serta sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan melakukan perubahan yang lebih baik untuk bangsa atau negara dengan membangun kapasitas masyarakat dan melakukan perubahan baik di bidang teknologi, termasuk nilai dan perilaku masyarakat

### 2.2.2 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Siagian (1983) yang di kutip oleh Suryono (2004) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang di lakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya Siagian (1983) yang di kutip oleh Adbulah Said (2012:8), dalam buku Siagian tersebut berpendapat Administrasi Pembangunan

mengemukakan bahwa definisi pembangunan sebagai suatu perubahan dan pertumbuhan memiliki batasan yang tegas antara perubahan dan pertumbuhan. Selain itu, Siagian menjelaskan bahwa pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan suatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan (Siagian dikutip oleh Said, 2012:8). Sehingga berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Siagian tentang definisi pembangunan adalah pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan. Sedangkan dalam pertumbuhan dapat berupa perkembangan atau peningkatan yang dalam hal ini dimaksudkan adalah manusia. Selanjutnya Siagian mengemukakan ide pokoknya tentang pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan
- d. Pembangunan mengarah pada adanya modernitas
- e. Modernitas dicapai melalui pembangunan bersifat dimensional
- f. Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan (Siagian 1983 dikutip oleh Suryono, 2004 :21).



Oleh karena itu, administrasi pembangunan dapat disimpulkan sebagai proses usaha suatu negara atau pemerintah yang dilakukan secara sadar untuk merealisasikan pertumbuhan dan perkembangan. Dimana melalui proses pembangunan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan akan terpenuhi.

## **2.3 Akses Informasi**

### **2.3.1 Definisi Akses Informasi**

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan menggunakan alat berupa telekomunikasi dan melalui saluran atau media. Akses informasi dapat dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan sumber informasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dapat terpenuhi. Akses terhadap kebutuhan informasi diakui sebagai hak dasar bagi setiap orang. Namun pada masyarakat terdapat kesenjangan, yaitu antara masyarakat yang mempunyai akses yang lebih terhadap informasi dan masyarakat yang kurang mempunyai akses informasi. Masyarakat yang miskin informasi sulit mendapatkan akses informasi karena perbedaan kemampuan ekonomi, sedangkan masyarakat yang kaya mudah mendapatkan informasi. Kesenjangan terjadi karena masyarakat sulit mendapatkan sumber informasi. Selain kemampuan ekonomi adalah masalah kesadaran pentingnya informasi, mengajarkan orang untuk mencari

informasi secara sistematis dan mendorong penyediaan informasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya lapisan sosial dimasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2013:381), “Sistem lapisan sosial adalah mereka yang biasanya memiliki kekuasaan dan wewenang”. Orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang akan mudah untuk mendapat informasi dari berbagai sumber misalnya dari koran, majalah, televisi, buku, guru atau orang yang berada disekitarnya, namun dengan ketersediaan sumber informasi tidak menjamin semua orang dapat mengaksesnya. Kesenjangan terjadi antara masyarakat yang miskin dan kaya terhadap ketersediaan sumber daya elektronik. Masyarakat yang kaya dapat dengan mudah mendapatkan informasi melalui internet, sedangkan masyarakat kurang mampu sulit mendapatkan akses internet karena faktor ekonomi dan kurangnya keahlian dalam mengoperasikan komputer atau alat sejenisnya. Menurut Tata Sutarbi (2005:23), “Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan“. Untuk mendapatkan informasi yang baik diperlukan media yang baik, agar informasi yang diterima tidak berubah.

Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data yang berguna sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Kesadaran berbagai bangsa akan pentingnya hak atas informasi telah dijamin untuk seluruh warga atas informasi. Secara umum termuat dalam Konstitusi, UUD 1945 Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Menurut Tata Sutarbi (2005:35), menyebut informasi yang berkualitas apabila informasi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Accuracy* (Akurat), Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda, apabila pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut dianggap akurat.
- b. *Timely* (Tepat waktu), Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
- c. *Relevant* (Relevan), Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi
- d. *Complete* (Lengkap), Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data faktornya.

### 2.3.2 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu administrasi negara. Organisasi publik sebagai fokus dalam ilmu administrasi negara selalu mengaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya yang cukup penting adalah informasi. Robert Mundick dalam Kumorotomo (2004:114) informasi dapat di analogikan sebagai darah dalam organisasi. Hal ini

berarti kalau aliran darah mengalami hambatan, maka organisasi akan jatuh pada posisi yang tidak sehat.

Adapun stuktur dalam sistem informasi manajemen publik menurut kumorotomo (2004:114-115) sebagai berikut :

1. Sistem informal meliputi sistem diskursus dan interaksi antara individu dan kelompok kerja organisasi. Karakteristik yang menonjol adalah perlunya memperhitungkan sifat politik dan budaya dalam organisasi yang termanifes dalam negosiasi dan tawar-menawar. Penilaian yang bersifat subjektif menjadi bagian yang penting dalam organisasi. Proses yang demikian sangat kompleks, khususnya yang menyangkut analisis kebijakan. Tanpa hal ini organisasi tidak akan berjalan.
2. Sistem formal meliputi sistem aturan, batasan organisasi, dan batasan wewenang. Hal ini biasanya di organisasikan secara hirarkis yang meliputi aturan organisasi dan metode kerja yang di kaitkan dengan berbagai macam profesi yang ada di dalam organisasi.
3. Sistem komputer formal meliputi aktivitas organisasi melalui formalisasi dan pemrograman. Sistem komputer merupakan sistem yang berinteraksi dengan faktor manusia (dalam konteks formal) dan dengan aturan kerja. Prinsip yang di terapkan adalah bebas nilai tetapi pada prakteknya SIM dan organisasi sangat di warnai dengan nilai-nilai dari mereka yang mendesain sistem. Efektifitas tergantung pada kecepatan, realibilitas, ketepatan, prediksi dan efisiensi.
4. Sistem komputer informal di kaitkan dengan penanganan komputer secara personal dan penggunaan sistem formal jaringan komputer

sebagai sarana penyatuan informasi yang tidak terstruktur dan informasi informal. Sistem informasi informal merupakan komponen dalam SIM yang relatif baru di bandingkan dengan komponen yang lainnya, tetapi memberikan kemungkinan perbaikan penyesuaian antara sistem informal dengan organisasi dan sistem formal.

5. Sistem eksternal, formal, dan informal tidak ada organisasi yang hidup dalam isolasi dan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungan eksternal harus terjadi.

Struktur-struktur tersebut saling berinteraksi. Kumorotomo (2004: 125) terdapat 4 unsur yang mempengaruhi suatu organisasi publik yaitu :

1. Manusia/perilaku, menjadi unsur penting karena aktivitas organisasi antarindividu atau antarkelompok, norma-norma informasi, persepsi, peran, kepemimpinan, konflik dalam kelompok, dan sebagainya. Perilaku organisasi dalam banyak hal ditentukan oleh perilaku kelompok dan perilaku individu.
2. Teknologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang diberlakukan oleh orang terhadap objek dengan atau tanpa alat bantu perkakas atau alat mekanis untuk mengadakan perubahan tertentu dalam objek tersebut. Secara luas teknologi juga berarti “penerapan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan”
3. Tugas (*task*), efisiensi organisasi dapat dicapai dengan menyusun tugas dan pekerjaan secara sistematis. Konsep inilah yang mendasari sistem pembagian kerja fungsional atau spesialisasi menurut jenis pekerjaan.

4. Struktur, digunakan untuk mengendalikan organisasi dan membedakan bagian-bagiannya guna mencapai tujuan bersama. Struktur merupakan penentuan rentang kendali, pelimpahan wewenang, formalisasi yang membuat aktivitas berjalan sesuai apa yang telah direncanakan.

Kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsur utama yang berpengaruh adalah unsur teknologi, yaitu teknologi otomatis atau komputerisasi. Pengembangan organisasi melalui ketersediaan teknologi otomatis atau teknologi komputer tidak dapat dilaksanakan dengan pengetahuan dasar tentang perangkat keras namun perlu untuk memahami pemenuhan perangkat lunak dan perangkat otak serta kebutuhan akan informasi dalam organisasi. Selanjutnya, pengembangan organisasi bukan menyangkut perangkat teknologi pendukungnya tapi yang terpenting adalah solusi. Solusi di rumuskan untuk memecahkan permasalahan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, peran dari sistem informasi manajemen dalam organisasi adalah untuk merumuskan solusi

## **2.4 Masyarakat Perbatasan**

### **2.4.1 Definisi Masyarakat Daerah Perbatasan**

Undang-undang No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara mendefinisikan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan kawasan lain, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan

perbatasan berada di kecamatan. Sedangkan masyarakat daerah perbatasan adalah mereka yang tinggal di wilayah atau kawasan tersebut.

Wilayah perbatasan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Peranan wilayah perbatasan sebagai fungsi keamanan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian nasional, regional, dan internasional. Pembangunan wilayah perbatasan menjadi penggerak perekonomian memberikan pengaruh pada aspek lain salah satunya pada sosial dalam masyarakat. Pembangunan wilayah perbatasan menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat wilayah perbatasan menjadi hal yang penting dalam pembangunan

#### 2.4.2 Kondisi Masyarakat Perbatasan

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Serawak, Malaysia Timur. Secara geografis, bagian utara provinsi Kalimantan Barat terdapat empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia yaitu Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Empat kabupaten tersebut membujur sepanjang pegunungan Kalingkang, Kapuas Hulu. Letak geografis kabupaten Kapuas hulu merupakan kabupaten yang paling dekat dengan Serawak Malaysia. Berbatasan dengan Negara yang perkembangannya lebih pesat dibandingkan Indonesia, namun Kabupaten Kapuas Hulu terutama desa-desa yang ada di daerah perbatasan tidak berkembang seperti yang di bayangkan. Kondisi masyarakat daerah perbatasan jauh dari kata sejahtera. Berdasarkan data informasi dari Dinas

Komunikasi dan Informatika 2017 tentang kondisi daerah perbatasan kabupaten Kapuas Hulu, kabupaten ini memiliki 182 desa yang mana desa-desa tersebut termasuk dalam kawasan 3T yaitu kawasan terdepan, terpencil, dan tertinggal dan 80% dari jumlah desa tersebut merupakan wilayah *blankspot* atau wilayah yang tidak memiliki sinyal untuk berkomunikasi. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan jaringan telekomunikasi dan informatika sebagai langkah untuk memberikan fasilitas telekomunikasi dan informatika kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah perbatasan.

## **2.5 Jaringan Telekomunikasi dan Informasi**

### **2.5.1 Definisi Jaringan Telekomunikasi dan Informasi**

Hedero dalam Nasution, (2001:57) Komunikasi bertujuan untuk mengubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*), atau tingkah laku (*behavior*) seseorang atau sejumlah orang, sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses komunikasi yaitu kebutuhan (*need*), tingkat pengetahuan, rasa suka atau tidak suka serta status, kebutuhan seseorang atau kelompok komunikasi sangat mempengaruhi ketentuan maupun keterlibatan pihak komunikasi dalam suatu proses komunikasi.

Sejalan dengan definisi komunikasi yang di kemukakan oleh Hedero dalam Nasution (2001). Effendy (1993:12) mendefinisikan



telekomunikasi sebagai proses atau teknik penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna sama bagi kedua pihak. Telekomunikasi menggunakan media pada situasi tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh tempatnya dan banyak jumlahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi merupakan teknik penyampaian informasi melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, Davis yang dikutip oleh Siagian (2000:29) mengemukakan bahwa Informasi adalah data yang telah di proses dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau untuk keputusan mendatang. Pendapat lain tentang informasi dikemukakan oleh Murdick et al yang di kutip oleh Kumorotomo dan Margono (1994:11) yaitu Informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah atau digunakan untuk memberi dukungan keterangan bagi pengambil kesimpulan, argumentasi, atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Serta informasi merupakan data yang telah disusun sehingga dapat memberikan manfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakan untuk membuat keputusan oleh sebab itu perlu dipahami bahwa pemakaian informasi jauh lebih penting karena informasi akan digunakan untuk menunjang keputusan. Sedangkan Sutanta (2003:10) mendefinisikan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data sehingga

manjadi bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan dampaknya secara langsung untuk masa sekarang atau secara tidak langsung untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi telekomunikasi dan informasi, dapat di definisikan jaringan telekomunikasi dan informasi adalah seperangkat alat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lain agar dapat saling bertukar informasi atau dapat di artikan sebagai alat yang digunakan informan untuk menyampaikan informasi kepada penerima informasi.

#### 2.5.2 Peran Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Peran komunikasi dalam proses pembangunan berdasarkan hasil rangkuman Hedebro dalam Nasution (2001:57) yang telah merangkum pendapat dari pakar yaitu Schramm dan Rao, sehingga Hedebro mendaftar 12 peran komunikasi dalam proses pembangunan sebagai berikut :

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan mengarahkan nilai-nilai, sikap mental dan perilaku yang menunjang modernisasi
2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan baru, mulai dari baca-tulis ke pertanian, keberhasilan lingkungan, hingga reparasi mobil
3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan

4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile
5. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata
6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan
7. norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transial
8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan pada masyarakat
9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sabagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal
10. Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga mampu meningkatkan aktivitas politik
11. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk
12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri. (Hedero dalam Nasution, 2001:57)

## 2.6 *Electronic Government*

### 2.6.1 Definisi *Electronic Government*

*Elektronic Government* atau *E-goverment* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat (Hasniati,2006:31). Selanjutnya World Bank 2001 mendefinisikan bahwa elektronik governance adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti *Wide are Network, Internet, dan Mobile computing*) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, Caldow (2001) mendefinisikan *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan menciptakan pemerintahan yang baik. Adapun tujuan penerapan *E-Government* menurut Anwar dan Oetojo (2004:126) adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan hubungan secara elektronik antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah
2. Perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan mempermudah akses komunikasi masyarakat

3. Menunjang *good governance* dan keterbukaan
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 2.6.2 Jenis *Elektronic Government*

Indrajid (2006:41-45) memaparkan empat klasifikasi dalam konsep penerapan E-Government, yaitu sebagai berikut :

##### 1. *Government to Citizens*

Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi informasi dengan tujuan utama yaitu untuk memperbiki hubungan interaksi dengan masyarakat dan mendekatkan masyarakat dengan pemerintah melalui akses yang beragam untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan

##### 2. *Government to Bussiness*

Membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian dapat berjalan merupakan salah satu tugas utama pemerintahan sehingga diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan berbagai kalangan bisnis untuk membantu praktisi bisnis dalam menjalankan roda perekonomiannya dan membawa keuntungan bagi pemerintah dengan terjalinnya relasi yang baik dengan sektor bisnis.

##### 3. *Government to Governments*

Kebutuhan untuk saling berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lain secara intens setiap hari tidak hanya pada hal yang diplomatis saja, namun untuk memperlancar kerjasama antar

negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam proses politik, mekanisme hubungan sosial budaya dan sebagainya.

4. *Governments to Employee*

Aplikasi *electronic government* di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai pemerintahan yang bekerja di sejumlah pelayan masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nazir (2005:54) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang meneliti status manusia, objek, situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2014:6) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang proses penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembangunan akses informasi masyarakat perbatasan melalui penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika, serta mengetahui dampak dari pembangunan akses informasi dan telekomunikasi terhadap masyarakat perbatasan.

#### 1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan arah atau yang membatasi peneliti dalam melakukan penelitian. Moelong (2001:62) mengemukakan bahwa “masalah dalam penelitian dinamakan fokus”. Fokus penelitian memiliki dua fungsi, yaitu: pertama,

membuat studi atau membatasi bidang-bidang masukan, misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi. Kedua, memenuhi kriteria masukan-keluaran suatu informasi yang diperoleh dilapangan. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika sebagai upaya pembangunan kapasitas masyarakat perbatasan :

a. Proses pembangunan

(1) Tahap perencanaan penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika

(2) Tahap Penganggaran penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika

(3) Tahap Pelaksanaan penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika

b. Penyediaan Sumber Daya

(1) Infrastruktur

(2) Sumber Daya Manusia

c. Peran Stakeholder

(1) Pemerintah

a) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

c) Dinas Lingkungan Hidup



- d) Badan Perencanaan Pembangunan
  - e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - (2) Swasta
    - a) Provider
  - (3) Teknisi
  - (4) *Sitte Kipper*
  - (5) Masyarakat
    - b) Masyarakat Desa Lauk
    - c) Masyarakat Desa Sungai Uluk Palin
2. Faktor Mempengaruhi Penyediaan Akses Informasi Masyarakat
- a. Pendukung
    - (1) Teknologi
    - (2) Dukungan Masyarakat
    - (3) Dukungan Pemerintah
  - b. Penghambat
    - (1) Struktur Geografis
    - (2) Keterbatasan Teknologi
    - (3) Imkompetensi Secara Teknologi
3. Dampak Penyediaan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan
- a. Dampak Positif
    - 1) Terbukanya akses Informasi
    - 2) Berkurangnya *Blankspot Area*

b. Dampak Negatif

- 1) Penyalahgunaan Informasi
- 2) Masyarakat Konsumtif

### 1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di dua desa yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yaitu Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin. Pemilihan dua desa tersebut sebagai lokasi penelitian karena keterbatasan waktu dan lokasi yang jauh tidak memungkinkan peneliti untuk mendatangi seluruh desa yang telah dibangun *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, karena di desa-desa tersebut *Base Transceiver Station* (BTS) di bangun pada periode pertama. Sedangkan, situs dalam penelitian ini adalah Dinas Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai dinas yang bertanggung jawab dan penyedia dari sarana telekomunikasi dan informatika di kabupaten kapuas hulu.

### 1.4 Jenis Data

1. Data primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan yang biasa dilakukan peneliti. Data primer dalam penelitian ini, yaitu diperoleh dari responden melalui wawancara adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Kepala Bagian Statistika dan Aplikasi Informasi Bapak Zulkipli S.H, M.A.P sebagai bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Kapuas Hulu yang mengurus pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS).

- (2) Kepala Divisi Statistik Bapak Sutik S.T yang membantu Pak Zulkipli dalam mengurus pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS)
- (3) Kepala Divisi Aplikasi Informatika Mohammad Yamin yang membantu Pak Zulkipli dalam mengurus pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS).
- (4) Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak Alfiansyah, S.E,M.Si
- (5) Sekretaris Desa Lauk Bapak Yohanes Kelen
- (6) Kepala Desa Lauk Bapak Bustami (periode 2012-2017)
- (7) Pejabat Sementara (Kepala Desa Sementara) Bapak Yohanes Husin
- (8) Warga Desa Lauk Zulkapli
- (9) Warga Desa Sungai Uluk Palin Yohanes Alon, Nikolaus Yuser, Jumaisiah Herlina, AM.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung pembahasan dari objek penelitian melalui dokumen-dokumen. Data sekunder sifatnya melengkapi data primer yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti dokumen dari objek penelitian, literatur, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini yang sudah tersedia di Dinas Telekomunikasi dan

Informatika kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, data sekunder berupa foto yang di dapat dari lapangan.

## 1.5 Sumber Data

### 1.5.1 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau menjadi sumber informasi dan data. Penelitian ini adapun yang menjadi informan adalah Kepala Bagian Statistika dan Aplikasi Informasi Bapak Zulkipli S.H, M.A.P sebagai bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang mengurus pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Kepala Divisi Statistik Bapak Sutik S.T yang membantu Pak Zulkipli dalam mengurus pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) Kepala Divisi Aplikasi Informatika Mohammad Yamin yang membantu Pak Zulkipli dalam mengurus pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Sekretaris Desa Lauk Bapak Yohanes Kelen. Kepala Desa Lauk Bapak Bustami (periode 2012-2017). Pejabat Sementara (Kepala Desa Sementara) Bapak Yohanes Husin dan warga Desa Lauk Zulkapli. Warga Desa Sungai Uluk Palin Yohanes Alon, Nikolaus Yuser, dan Jumaisiah Herlina, AM.

### 1.5.2 Peristiwa

Peristiwa atau aktivitas adalah perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan objek yang sedang di teliti. Peneliti memperoleh data dengan

mendatangi langsung lokasi yang telah di bangun *Base Transceiver Station* (BTS) di Kapuas Hulu. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan di Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin.

### 1.5.3 Dokumen

Dokumen adalah bahan tertulis yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Dokumen berupa Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2016-2021, Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang penetapan wilayah pelayanan universal telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang penyelenggaraan jaringan komunikasi, Rekapitulasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu 2017, Persyaratan Pengajuan Proposal BTS Kapuas Hulu dalam Angka 2017, Data Pokok dan Potensi Desa Lauk 2017, Data pokok dan Potensi Desa Sungai Uluk Palin 2017. Sedangkan gambar berupa gambar bangunan tower BTS di Desa Lauk dan gambar bangunan tower BTS di Sungai Uluk Palin. Selain itu, rekaman hasil wawancara.

## 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memperoleh data tentang fenomena yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

### 1.6.1 Wawancara

Pada Penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Herdiansyah (2015), Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti dapat mengajukan pertanyaan bebas dan subjek penelitian diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Sugiyono (2014:140) mengemukakan bahwa Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Peneliti melakukan wawancara dengan sebelas Narasumber. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dari penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika di wilayah *blankspot* Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kapuas Hulu. Kemudian wawancara dilakukan untuk mengetahui dampak dari pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) terhadap masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

### 1.6.2 Observasi

Herdiansyah (2015:143) Observasi di definisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan

mencari data yang dapat di gunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

Penelitian ini observasi dilakukan di Dinas Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu dan mendatangi Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin sebagai lokasi yang menjadi fokus penelitian ini. Pemilihan Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin sebagai fokus penelitian ini karena akses menuju ke Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin lebih mudah untuk dijangkau jika dibandingkan Desa lain yang sudah memiliki *Base Transceiver Station* (BTS).

#### 1.6.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa, buku, hasil laporan, jurnal, makalah serta Undang-undangan dalam penelitian kualitatif, teknik ini digunakan untuk melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi pada penelitian ini mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu, Profil Kabupaten dan Desa lokasi penelitian, serta beberapa gambar hasil dokumentasi yang dilakukan pada saat observasi.

### 1.7 Instrumen Penelitian

#### 1.7.1 Peneliti Sendiri

Penelitian dengan pendekatan kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrumen, peneliti harus memiliki

bekal wawasan yang luas dan teori yang kuat. Selain itu, dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Human Instrument bersifat holistic emphasize artinya manusia alat yang dapat memahami keseluruhan konteks. Human instrument memungkinkan perluasan pengetahuan secara langsung karena memang menghubungkan langsung dengan responden sehingga memungkinkan untuk memahami makna dari berbagai bentuk interaksi di lapangan.

#### 1.7.2 Pedoman Wawancara

Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang di butuhkan. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara (terlampir).

#### 1.7.3 Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang merupakan alat-alat yang membantu dalam mencatat hal penting selama kegiatan penelitian berlangsung. Peneliti pada saat penelitian menggunakan alat-alas sebagai berikut. Wawancara peneliti menggunakan alat tulis, pedoman wawancara dan *Handphone* (Hp) sebagai alat rekam pada saat wawancara. Kemudian peneliti juga menggunakan kamera *Handphone* untuk mengambil gambar dokumentasi pada saat penelitian. Setelah melakukan wawancara dan observasi peneliti membuat catatan lapangan (*Field Note*).



## 1.8 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dan bagaian yang penting dalam suatu penelitian ilmiah, dengan menggunakan analisis data akan memberikan pemaknaan untuk data dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data untuk data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan hasil data yang di peroleh. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Model analisis data interaktif di pilih karena memberikan sistematika yang sesuai untuk peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh.

Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33) untuk menganalisis data hasil penelitian terdiri dari tiga tahapan yaitu :

### 1. *Data Condensation* ( Kondensasi data)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang di dapat di lapangan. Kondensasi data di lakukan dari data yang di peroleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di tuangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan memfokuskan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

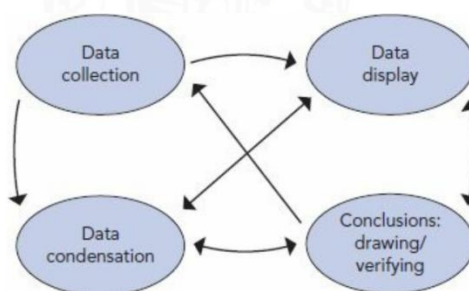
### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai di kondensasi. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk

memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian, dengan melihat penyajian-penyajian data, maka dapat diketahui dan dipahami apa yang sedang terjadi dan dapat mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan analisis berdasarkan penyajian-penyajian tersebut. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks atau uraian.

### 3. *Conclusion Drawing / Verifing* (Menarik Kesimpulan / verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama masuk lapangan dan selama proses pengumpulan data guna mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang terjadi dalam penelitian dan selanjutnya data-data yang di peroleh harus di tinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid.



**Gambar 3.1** Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

*Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)*

## 1.9 Keabsahan Data

Moleong (2009:324-326), keabsahan data memiliki empat kriteria yang digunakan, yaitu :

### 1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Berfungsi melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

### 2. Keteralihan (*transferability*)

Mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, menyediakan data deskriptif secukupnya dan melakukan penelitian kecil.

### 3. Keterantungan (*dependability*)

Kriteria ini ditunjukkan dengan jalan mengadakan replika studi, jika dua atau beberapa kali di adakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai

### 4. Kepastian (*confirmability*)

Pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.

Keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah Triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu cara pengujian keabsahan data yang masuk dalam jenis uji kredibilitas/*credibility* (validasi internal). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Berikut tiga macam triangulasi yaitu :

(1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber.

(2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

(3) Triangulasi Waktu

Waktu mempengaruhi kredibilitas data. Oleh karena itu, dalam menguji kredibilitas data dapat di lakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum akan menampilkan data kondisi geografis, jumlah penduduk dan persebarannya, struktur organisasi Kabupaten Kapuas Hulu. Menampilkan Visi, Misi, Struktur Organisasi, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Profil Desa Lauk berupa kondisi geografis, jumlah penduduk, Struktur pemerintah desa, fasilitas komunikasi dan informasi, potensi desa Lauk dan desa Sungai Uluk Palin. Berikut merupakan penjabaran gambaran umum Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin.

##### 4.1.1 Kabupaten Kapuas Hulu

###### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kapuas Hulu, secara geografis di sebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur). Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Melawi. Sementara sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak kurang lebih 240 km dan melebar dari

Utara ke Selatan dengan jarak kurang lebih 126,70 km. Kabupaten Kapuas Hulu terletak di ujung paling Timur Provinsi Kalimantan Barat, dengan jarak kurang lebih 657 km melalui jalan darat, dan 843 km melalui sungai kapuas. Waktu tempuh ke Pontianak kurang lebih empat puluh lima menit penerbangan menggunakan pesawat udara atau kurang lebih 16 jam dengan kendaraan darat. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 23 Kecamatan yaitu Silat Hilir, Silat Hulu, Hulu Gurung, Bunut Hulu, Mentebah, Bika, Kalis, Putussibau Selatan, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Boyan Tanjung, Pengkadan, Jongkong, Selimbau, Suhaid, Seberuang, Semitau, Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu dan Putussibau Utara. Dari 23 Kecamatan, Putussibau Selatan, Putussibau Utara dan Embaloh Hulu merupakan tiga kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas masing-masing 5.353,30 km<sup>2</sup> , 5.204,80 km<sup>2</sup> dan 3.457,60 km<sup>2</sup> atau setara dengan 17,94 persen, 17,44 persen, dan 11,59 persen dari luas Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Kecamatan Puring Kencana merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil. Luas wilayah kecamatan Puring Kencana kurang dri 300 km<sup>2</sup> atau kurang dari 1 persen luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.



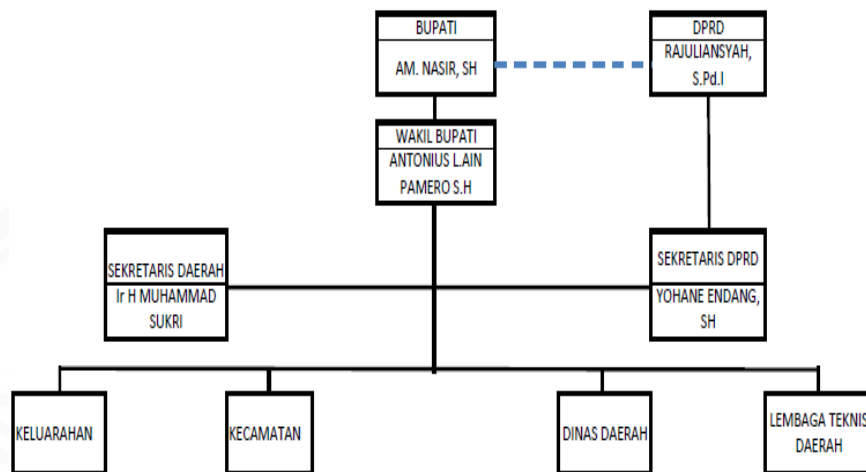
**Gambar 4.1** Peta Administratif Kabupaten Kapuas Hulu  
*Sumber : Kapuas Hulu Dalam Angka 2017*

## 2. Jumlah Penduduk dan Sebarannya

Berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 250.400 jiwa yang menyebar di 23 Kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 8 jiwa/ km<sup>2</sup> dengan luas wilayah yang mencapai 29.842 km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak lahan kosong yang belum berpenghuni yang dapat dimanfaatkan. Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah Putussibau Utara, Putussibau Selatan dan Sibau Hilir yang masing-masing mempunyai jumlah penduduk 26.753 jiwa, 21.097 jiwa, dan 19.145 jiwa pada tahun 2016. Namun, walaupun demikian Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Hulu Gurung yang mencapai 32 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Jongkong 26 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Suhaid yang kepadatannya sebesar 20 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Embaloh Hulu yaitu hanya 2 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Batang

Lupar dan Putussibau Selatan dengan kepadatan penduduk masing-masing 4 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 3. Peta Organisasi



**Gambar 4.2** Struktur Jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
 Sumber : *Kapuashulukab.go.id*

#### 4.1.2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika merupakan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Secara garis besar tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengimplementasikan *E-Government*. Implementasi *E-Government* sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, tujuan dari *E-Government* adalah untuk melakukan peningkatan



pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Adapun tugas pokok dan fungsi dari dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika telah disusun dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rancangan Rencana Strategis tersebut di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021.

#### 1. Visi

Adapun visi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu :

Terwujudnya masyarakat informatif dan berdaya saing berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten kapuas Hulu.

#### 2. Misi

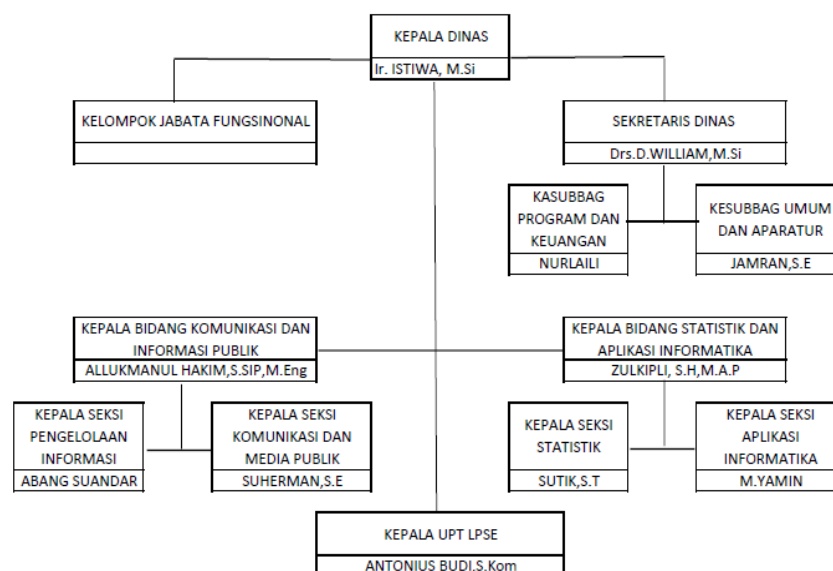
Adapun misi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan sarana dan prasarana pembangunan komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi
- (2) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat
- (3) Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan

- (4) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme
- (5) Membangun sistem informasi pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (6) Menyediakan layanan yang aman berkualitas dan terstandarisasi kepada pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

### 3. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:



**Gambar 4.3** Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kab.Kapuas Hulu

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kab. Kapuas Hulu

Kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tersebut diatas sebagaimana susunan menurut bidang dan bagian berikut ini:

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika sesuai dengan kewenangan serta menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- b. Mengkoordinasi seluruh kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan instansi lainnya
- c. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- d. Memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana dan operasional serta kebijakan yang sudah di tetapkan
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- f. Memantau dan mengawasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik secara periodik
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## (2) Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan teknis operasional serta memberikan pelayanan administrasi urusan keuangan, perencanaan dan umum, aset dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas. Adapun fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja
- b. Mengkoordinasi penyusunan program kerja
- c. Mengelola administrasi keuangan
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatus, dan tata laksana
- e. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- g. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
- h. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub bagian Program dan Keuangan

Sub bagian Program dan keuangan bertugas untuk membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan program kerja serta pengelolaan administrasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Adapun Fungsi Sub bagian Program dan Keuangan yaitu :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Keuangan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
- d. Menyusun Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Dinas
- e. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT
- f. Pengendalian dan Pelaporan Program Kerja
- g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan
- h. Menyusun neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan
- i. Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan
- j. Memantau, mengevaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan

k. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

(4) Sub bagian Umum dan Aparatur

Adapun tugas Sub bagian umum dan aparatur yaitu membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas pengumpulan dan pengolahan bahan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Berdasarkan tugasnya tersebut Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur
- b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan pembangunan aparatur
- c. Menyelenggarakan ketatalaksanaan
- d. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, dan perpustakaan
- e. Pengelolaan barang milik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- f. Memantau, mengevaluasi dan melakukan pelaporat tentang pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Aparatur
- g. Pelaksanaan fungsi lain yan di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

(5) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik adalah membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugasnya bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
- b. Menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Komunikasi dan Informasi Publik
- c. Melakukan pembinaan komunikasi dan media publik
- d. Mengelola informasi publik
- e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informasi Publik
- f. Mengevaluasi pelaksanaan seksi-seksi pada bidang Komunikasi dan Informasi Publik secara periodik
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari dua seksi yaitu :

- 1) Seksi Pengelolaan Informasi, seksi Pengelolaan Informasi bertugas membantu Bidang Komunikasi dan informasi publik dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

pengelolaan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Informasi melaksanakan fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi
  - b) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, pengelolaan informasi publik
  - c) Mengumpulkan dan mengelola informasi publik
  - d) Melaksanakan pelayanan informasi publik
  - e) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi
  - f) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Seksi Komunikasi dan Media Publik, Seksi Komunikasi dan Media Publik bertugas membantu Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan komunikasi dan media publik. Untuk melaksanakan tugas Seksi Komunikasi dan Media Publik melaksanakan fungsi :
- a) Menyusun rencana kegiatan seksi komunikasi dan media publik
  - b) Menyiapkan bahan petunjuk tekni dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan media publik



- c) Menyediakan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik
  - d) Melakukan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
  - e) Menyediakan akses informasi di Kabupaten
  - f) Membina pengelolaan media komunikasi publik
  - g) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi komunikasi dan media publik
  - h) Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (6) Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika bertugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika. Adapun fungsi Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika
- b. Menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika
- c. Melaksanakan statistik sektoral
- d. Mengelola Aplikasi Informatika

- e. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika
- h. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika terdiri dari dua seksi, diantaranya :

1) Seksi Statistik

Seksi Statistik bertugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam penyampaian bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan statistik sektoral. Adapun fungsi Seksi Statistik, yaitu :

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi statistik
- b) Menyiapkan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan statistik sektoral
- c) Melaksanakan statistik sektoral
- d) Memberi dukungan survei skala nasional di tingkat kabupaten
- e) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi statistik

- f) Melaksanakan fungsi yang di berikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## 2) Seksi Aplikasi Informatika

Seksi Aplikasi Informatika bertugas membantu Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aplikasi informatika. Adapun fungsi yang di laksanakan oleh Seksi Aplikasi Informatika, yaitu :

- a) Menyusun rencana kerja seksi Aplikasi Informatika
- b) Menyiapkan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Informatika
- c) Mengelola nama domain serta pengelolaan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah
- d) Pemberdayaan informatika meliputi *data center*, *disaster recovery center*, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pengembangan internet dan penggunaan akses internet pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten
- e) Pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan di kabupaten
- f) Mengembangkan dan mengelola aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di kabupaten

serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat

- g) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksana tugas seksi Aplikasi Informatika
- h) Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### (7) Unit Pelayanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)

Unit Pelayanan Pengadaan secara Elektronik dipimpin oleh seorang kepala unit kepala unit mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelayanan pengadaan secara elektronik sesuai wewenang yang dilimpahkan dan peraturan perundang-undangan. Kepala unit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

LPSE Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu unit pelaksana layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik
- b. Memfasilitasi rencana umum pengadaan (RUP)

- c. Pengelolaan e-Procurement atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sebagai User Management untuk Aplikasi SiRUP serta Monev OL/TEPRA
- d. Menyediakan pelatihan kepada Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya
- e. Menyediakan akses internet bagi Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya
- f. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada Panitia/ULP dan Penyedia barang/jasa serta pengguna lainnya. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Admin Agency penyedia barang/jasa dan pengguna lainnya.

#### 4. Kinerja Pelayanan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Kapuas Hulu melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan, dinamika, dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat tercapai. Proses

pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berikut ini :

(1) Bidang Komunikasi Informasi Publik

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang komunikasi Informasi Publik adalah berkaitan dengan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta penyerapan aspirasi/aduan/kritik dan saran dari masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Publik (KIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, mengelola, melesterikan dan menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan informasi publik diwujudkan melalui kegiatan berikut :

- a. **Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.** Output dari kegiatan ini adalah Buletin Unck Kapuas yang terbit empat kali dalam setahun. Namun pada perencanaan anggaran kedepan melalui Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, bahwa pada kegiatan ini akan dirubah output kegiatan berupa Kaledoskop Dokumentasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran berjalan. Kaledoskop ini akan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Bupati, Wakil Bupati dan Dinas Kominfo Statistik dari awal tahun anggaran sampai akhir tahun anggaran. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi visual bagi masyarakat mengenai progres pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

**b. Kegiatan Pengembangan Media Siaran LPPL Rasika FM**

**Melalui *Protocol Streaming*.** Lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah Radio Siaran Kapuas Hulu (Rasika). Radio ini berdiri sejak tahun 1992 dan pada tahun 2014 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan nama lembaga RASIKA melalui frekuensi 103,4 FM. Radio Rasika berfungsi sebagai media informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan di Kapuas Hulu. Jangkauan siaran radio Rasika masih terbatas sehingga melalui Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, selain peningkatan jangkauan frekuensi melalui pengadaan booster, pengembangan jangkauan siaran radio akan dibuat alternatif melalui *Protocol streaming*. Melalui kegiatan ini diharapkan informasi terkait dengan Kapuas Hulu akan dapat di dengar dengan skala yang lebih luas.

c. **Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi layanan publik.** Pada tahun anggaran 2018, terdapat tiga hal yang akan dilaksanakan dalam sistem ini, antara lain :

- 1) Layanan Informasi publik, yaitu layanan informasi kepada masyarakat melalui autoplay sms sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Penyusunan sistem ini akan diawali dengan melaksanakan koordinasi ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan publik. Koordinasi ini akan merangkul semua layanan publik baik berupa persyaratan layanan dan kontak person layanan. Tujuan dari sistem layanan ini adalah untuk mempermudah masyarakat mencari informasi terkait persyaratan dan lain-lain terhadap layanan yang diinginkan.
- 2) Layanan Pengaduan, layanan ini merupakan tujuan utama dari pengembangan sistem informasi. Melalui layanan ini masyarakat dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan. Kontribusi tersebut berupa pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Melalui layanan ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan jawaban yang valid terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka. Selain itu, hal ini akan mendorong



transparansi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Khususnya.

- 3) Layanan *Broadcast*, layanan ini merupakan salah satu penyebarluasan informasi dari atas ke bawah. Artinya, pada jajaran pimpinan daerah dapat memberikan informasi langsung kepada jajaran dibawah sampai dengan lingkup aparat desa. Pembangunan data sistem ini akan dilaksanakan dengan melakukan sensus nomer posel aparat desa, pejabat struktural diwilayah kecamatan dan kabupaten serta kepala UPT diseluruh Kapuas Hulu. Melalui layanan ini, pimpinan daerah akan memiliki akses penyampaian informasi baik secara massal, custom maupun personal terhadap seluruh bawahannya. Sehingga harapannya adalah pelaksanaan arahan pimpinan dapat segera diterima dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat secara umum dapat terlaksana dengan lancar.
- 4) Sosialisasi Sistem Penyebarluasan Informasi melalui SMS Broadcast, SMS Center dan SMS Gateway. Sosialisasi sistem informasi ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik yang telah di buat. Harapan dari sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan secara optimal dari layanan informasi.

- 5) Sosialisasi tentang Manfaat dan Bahaya penggunaan Komunikasi dan Informatika di Media Publik. Media publik atau dapat di sebut sebagai media sosial telah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa manfaat media sosial tergantung dari bagaimana penggunaannya. Untuk itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika merupakan lembaga pemerintah yang menangani hal tersebut perlu untuk membuat kegiatan sosialisasi agar masyarakat, khususnya kalangan remaja dapat menggunakan media publik/sosial kepada nilai-nilai positif. Selain melaksanakan sosialisasi, dinas kominfo juga akan melaksanakan kampanye-kampanye tentang pemanfaat media publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada seperti : website, radio, baleho dan media cetak. Harapan yang diinginkan dari kegiatan ini adalah pemanfaatan teknologi oleh masyarakat kearah yang positif dan produktif.
- 6) Kegiatan Peningkatan Operasional Layanan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Rasika Kapuas Hulu FM sebagai media penyebarluasan informasi. Operasional layanan informasi melalui LPPL Rasika melayani kepentingan masyarakat umum secara luas, mengembangkan budaya bangsa, memajukan kesejahteraan umum guna membangun masyarakat yang

mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera melalui tersedianya informasi yang memadai.

- 7) Kegiatan Peningkatan Jangkauan Penerimaan Frekuensi LPPL Radio Rasika FM Kabupaten Kapuas Hulu. Jangkauan Penerimaan LPPL Rasika FM Kabupaten Kapuas Hulu belum menjangkau 23 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu adanya peningkatan Kapasitas Frekuensi Penerimaan Siaran LPPL Radio Rasika Kabupaten Kapuas Hulu agar bisa menjangkau 32 Kecamatan. Berdasarkan hasil monitoring penerima jangkauan frekuensi LPPL Rasika Kecamatan yang menerima jangkauan frekuensi LPPL Rasika FM sebanyak 10 Kecamatan dan yang belum menerima Jangkauan Penerimaan Frekuensi LPPL Rasika FM sebanyak 13 Kecamatan.
- 8) Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana peralatan Studio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Rasika Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan operasioanl penyampaian informasi kepada masyarakat secara efisien.
- 9) Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Kapuas Hulu. Kelompok Informasi Masyarkat (KIM) dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota

kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerja sama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

- 10) Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Singkat Jurnalis untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menuju masyarakat dan kelompok informasi masyarakat yang cerdas, kreatif dan mandiri yang berinovatif dan berkreasi dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang informasi dalam penulisan naskah berita sebagai bahan penyebarluasan informasi dalam mendukung kemajuan pembangunan dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 11) Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Komunikasi dan Informasi. Pelatihan ini dilakukan khususnya bagi kelompok informasi masyarakat (KIM). Pelatihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan Komunikasi yang baik dan benar dalam media informasi publik serta untuk memberdayakan masyarakat agar memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat. Sehingga diharapkan mampu untuk mengelola dan menghadirkan informasi timbal balik yang baik dan dapat menjadi wahana masyarakat untuk

memperoleh dan menyalurkan informasi terutama dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

- 12) Kegiatan Desiminasi Media Tradisional melalui Pertunjukan Rakyat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi melalui media tradisional. Pertunjukan rakyat di kemas dalam bentuk lakon atau drama maupun sandiwara yang dilaksanakan pada kegiatan Apresiasi Informasi Media Tradisional dengan menunjuk Sanggar Lancang Kuring Nurul Iman Putussibau. Kegiatan Apresiasi Media media tradisional telah dilaksanakan dari tahun 2015. Kegiatan Apresiasi Media Tradisional dilaksanakan dalam rangka persiapan Pekan Informasi Nasioanl (PIN) serta untuk mempertahankan budaya media komunikasi tradisional.
- 13) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah internet website. Adapun pemanfaatan fungsi Website adalah sebagai berikut; dil level pertama berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi dari dan kepada publik. Kedua, berfungsi sebagai media interaktif keterhubungan dengan lembaga/instansi lain. Ketiga, berfungsi memberikan transaksi pelayanan publik. Keempat, fungsi dari website ini adalah

pemanfaatan website yang mengintegrasikan aplikasi untuk pelayanan *Government to Government (G2G)*, *Government to Bussiness (G2B)*, *Government to Consumers (G2C)*.

14) Kegiatan Dokumentasi Berbasis Data Digital Pada Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini adalah proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital disebut SCANNING atau DIGITALISASI. Kegiatan ini dilakukan untuk menggalakan salah satu program pemerintah yaitu sistem E-Govenment. Dimana sistem E-Government dilakukan dengan digitalisasi.

(2) Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik

Bidang Aplikasi Informasi dan Statistik pada dinas Komunikasi Informatika dan statistika kabupaten Kapuas Hulu berperan aktif memberikan pelayanan internet kepada masyarakat melalui Media Center Kabupaten, penyebarluasan informasi melalui *Mobile Community Access Point (M-CAP)*, Penyuluhan mengenai Internet Sehat, Penyediaan Data Center sebagai Pusat Data bagi website Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melakukan pengelolaan situs [www.kapuashulukab.go.id](http://www.kapuashulukab.go.id), situs elektronik mail Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, situs layanan pengadaan secara elektronik, situs satuan perangkat daerah, dan situs dewan perwakilan rakyat

daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bidang Aplikasi Informatika dan Statistik antara lain :

- a. Kegiatan Updating Data Pokok.** Kegiatan ini meliputi penyampaian formulir pengisian Data pokok ke setiap kecamatan, dan desa di wilayah Kabupaten kapuas Hulu dan pengembalian formulir pengisian data pokok yang sudah di isi oleh setiap kecamatan dan desa di wilayah kabupaten kapuas hulu untuk dihimpun, direkapitulasi, dan disusun menjadi Buku Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Survey Statistika Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu.** Kegiatan survey statistika sektoral kabupaten meliputi survey yang di laksanakan di seluruh sektor di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebelum form dri Data Pokok disebarkan ke Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Survey Statistik Dasar Kabupaten Kapuas Hulu.** Kegiatan Survey Statistik Dasar Kabupaten Kapuas Hulu meliputi kegiatan survey penduduk, ekonomi dan pertanian dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebelum form Data Pokok dasar diserahkan pada Petugas Pengumpul Data.
- d. Sosialisasi Tugas dan Fungsi Petugas Pengumpulan Data.** Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia tentang tugas dan fungsi pengumpul data pokok dalam

menyusun data yang telah terkumpul di Kabupaten Kapuas Hulu.

**e. Pengumpulan data disemua sektor.** Formulir pengisian data pokok yang sudah disampaikan ke kecamatan ataupun desa di isi dan dia ambil kembali oleh Dinas Komunikasi, Informatika Statistika Kabupaten untuk di input kemudian dicetak dijadikan Buku Data Kabupaten Kapuas Hulu.

**f. Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data Pokok Di Kabupaten Kapuas Hulu.** Kegiatan monitoring dan evaluasi tentang data pokok agar proses pengumpulan data dapat termonitor dievaluasi untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam proses pengumpulan data pokok yang sudah dilaksanakan.

### (3) UPT LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE merupakan unit yang menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE), kemudian diharapkan dapat melaksanakan fasilitas layanan



pengadaan barang/jasa yang terintegrasi secara tepat sasaran, bersih, transparan, dan akuntabel. LPSE berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT LPSE adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi LPSE Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini mencakup pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan operasional LPSE Kabupaten Kapuas Hulu agar LPSE Kapuas Hulu dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Kegiatan Pemutakhiran Data Rencana Umum Pengadaan dan Pengguna Aplikasi E-Procurement. Kegiatan ini untuk mendukung kelancaran pengumuman rencana umum pengadaan dan penggunaan aplikasi SPSE. Adapun pemutakhiran yang dilakukan berupa data pengguna aplikasi SiRUP dalam hal ini digunakan untuk pembuatan akun pada aplikasi SiRUP serta mendukung kelancaran pengumuman Rencana Umum Pengadaan yang harus segera diumumkan pada portal LPSE.
- c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SPSE. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui dan mengatasi kendala

atau masalah yang terjadi dilapangan sehingga dapat dilakukan proses perbaikan dan perubahan kedepan dalam Penggunaan Aplikasi SPSE.

- d. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi *E-Procurement*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyampaian informasi kepada pengguna aplikasi *E-Procurement* diantaranya PPK, Pejabat Pengadaan, ULP, Pokja, admin SKPD dan penyedia sehingga informasi tersebut dapat segera diketahui oleh pengguna aplikasi *E-Procurement* dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan/kebijakan yang ada.
- e. Bimbingan Teknis *E-Procurement*. Kegiatan pembimbingan ini dilakukan untuk memberi pelatihan/bimbingan teknik aplikasi kepada pengguna aplikasi *E-Procurement* agar pada pengguna Aplikasi dapat mengoperasikan/menggunakan Aplikasi *E-Procurement* secara baik dan benar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

#### 4.1.3 Desa Lauk

##### 1. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak Geografis, sebelah utara Desa Lauk berbatasan dengan Malaysia. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Prapat Kecamatan Embaloh Hulu. Sementara sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benua Tengah

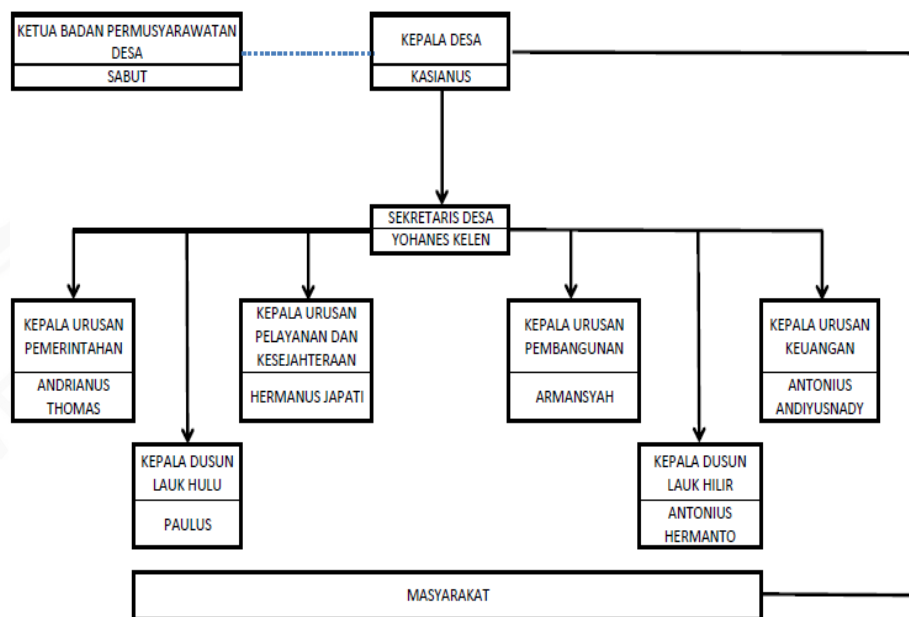
Kecamatan Putussibau Utara. Waktu tempuh dari Pontianak menuju Desa Lauk kurang lebih 18 jam menggunakan jalur darat. Sedangkan jika menggunakan jalur udara harus melakukan penerbangan selama empat puluh lima menit ke Putussibau, kemudian harus tetap melanjutkan perjalanan darat kurang lebih dua jam. Adapun luas wilayah dan Orbitrasi Desa Lauk adalah sebagai berikut : Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Luas Wilayah Desa Lauk adalah 80.802 Ha. Adapun pemanfaatan lahan di Desa lauk antara lain, sebagai lokasi ladang 150 Ha, lokasi perkebunan 25 Ha, Waduk 2 Ha, Lahan Lainnya 138 Ha, dan sisa yang belum di kolola seluas 80.487 Ha. Lahan yang belum di kelola merupakan hutan. Sedangkan Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) Desa Lauk berdasarkan Data Pokok Desa menunjukan bahwa adalah jarak Desa Lauk dengan pusat pemerintahan kecamatan dan kota 50 Km. Sedangkan jarak antara Desa Lauk dan Ibu Kota Provinsi adalah 580 Km.

## 2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Lauk berdasarkan Data Pokok Desa bulan Februari 2018 adalah 428 Jiwa. Dimana penduduk laki-laki berjumlah 211 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 217 jiwa. Data jumlah penduduk berdasarkan usia dapat di jabarkan sebagai berikut. Jumlah anak

usia 0-17 tahun adalah 167 jiwa, usia 18-55 tahun berjumlah 222 jiwa, dan usia >55 tahun berjumlah 37 jiwa.

3. Struktur Pemerintah Desa



**Gambar 4.4** Struktur Organisasi Desa Lauk  
 Sumber : Data Pokok Desa Lauk 2018

4. Fasilitas Komunikasi dan Informasi

Desa Lauk merupakan satu dari 267 desa yang tergolong *area blankspot* atau kawasan yang tidak memiliki jaringan telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2016 telah berdiri tower mini atau yang di kenal dengan BTS (*Base Transceiver Station*). Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) merupakan hasil dari program Kementerian Telekomunikasi dan Informatika yaitu KPU/USO. Setelah pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di desa Lauk memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat

khususnya memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari luar. Namun, kapasitas dari BTS (*Base Transceiver Station*) hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan informasi masyarakat melalui via telepon dan SMS (*Short Message Service*/layanan pesan singkat). Sedangkan untuk mengakses internet di Desa Lauk belum dapat dilakukan.

#### 5. Potensi

Berdasarkan data potensi, masyarakat Desa Lauk bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Pada tahun 2017, data potensi Desa Lauk menunjukkan bahwa 140 orang warga masyarakat Desa Lauk berprofesi sebagai petani dan 60 orang warga masyarakat Desa Lauk berprofesi sebagai buruh tani. Komoditas utama Desa Lauk adalah padi ladang. Data potensi Desa Lauk 2017 juga menunjukkan bahwa 30/ha lahan di Desa Lauk ditanami padi ladang dengan hasil produksi sebesar 2 ton/ha. Selain padi ladang potensi yang di miliki oleh Desa Lauk adalah sektor pekebunan. Pada sektor pekebunan yang menjadi komoditas utama adalah karet. Berdasarkan data potensi 30/ha lahan ditanami karet dengan hasil produksi 2 ton/ha. Selain, karet pada sektor pekebunan Desa Lauk memproduksi kelapa dan coklat meskipun luas lahan yang digunakan untuk pekebunan kelapa dan coklat tidak luas. Namun hasil produksi dari kelapa

dan coklat cukup banyak. Dimana hasil produksi kepala 2 ton/ha dan coklat 0,5 ton/ha. Sebenarnya jika dilihat berdasarkan data yang di tampilkan pada data potensi biaya produksi dari perkebunan kelapa dan coklat cenderung lebih rendah di bandingkan dengan biaya produksi karet. Biaya produksi yang di keluarkan untuk perkebunan kelapa adalah Rp 3.000.000,- sedangkan coklat mencapai Rp 12.000.000,- dibandingkan biaya produksi karet yang mencapai Rp 420.000.000,- per tahun. Sehingga, jika komoditas utama dialihkan dan di fokuskan dalam memproduksi kelapa atau coklat maka biaya produksi yang di keluarkan akan lebih sedikit. Apalagi pada saat ini karet mengalami penurunan harga dari Rp 15.000/kilo menjadi Rp 6.000/kilo. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan pengalihan komoditas yang di utamakan untuk perkembangan perekonomian masyarakat.

#### 4.1.4 Desa Sungai Uluk Palin

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Sungai Uluk Palin berdasarkan letak geografis, sebelah utara Desa Sungai Uluk Palin berbatasan dengan Desa Benua Tengah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seluan dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Nyabau. Sementara sebelah Timur berbatasan dengan Serawak Malaysia. Waktu tempuh dari Pontianak menuju Desa Sungai Uluk Palin kurang

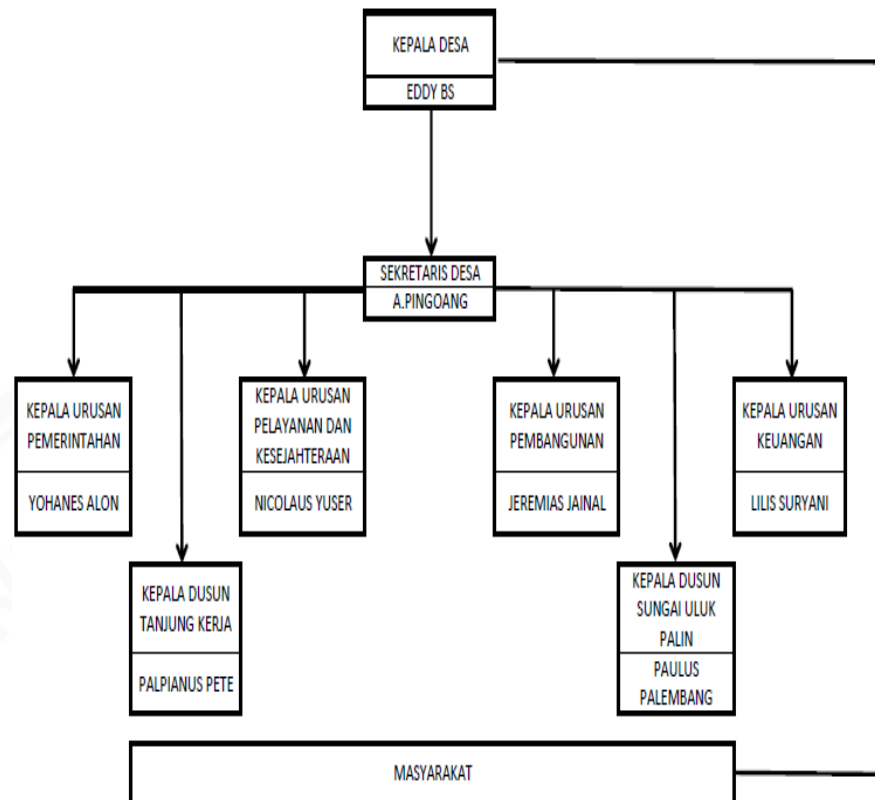
lebih 17 jam menggunakan jalur darat. Sedangkan jika menggunakan jalur udara harus melakukan penerbangan selama empat puluh lima menit ke Putussibau, kemudian harus tetap melanjutkan perjalanan darat kurang lebih satu jam.

Luas wilayah dan Orbitasi Desa Sungai Uluk Palin berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Luas Wilayah Desa Sungai Uluk Palin adalah 2.808 Ha. Adapun pemanfaatan lahan di Desa lauk antara lain, sebagai lokasi ladang 600 Ha, lokasi perkebunan 500 Ha, dan Lahan Lainnya seperti pemukiman penduduk 1.708 Ha. Sedangkan Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) Desa Sungai Uluk Palin berdasarkan Data Pokok Desa menunjukkan bahwa adalah jarak Desa Sungai Uluk Palin dengan pusat pemerintahan kecamatan 39 Km dan kota 40 Km. Sedangkan jarak antara Desa Lauk dan Ibu Kota Provinsi adalah 600 Km.

## 2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Sungai Uluk Palin berdasarkan Data Pokok Desa bulan Februari 2018 adalah 1.088 Jiwa. Dimana penduduk laki-laki berjumlah 462 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 626 jiwa.

### 3. Struktur Organisasi Desa



**Gambar 4.5** Struktur Ogranisasi Desa Sungai Uluk Palin  
*Sumber : Data Pokok Desa Sungai Uluk Palin 2018*

### 4. Fasilitas Komunikasi dan Telekomunikasi

Selain Desa Lauk, Desa Sungai Uluk Palin juga merupakan desa yang tergolong *area blankspot* atau kawasan yang tidak memiliki jaringan telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2016 telah berdiri tower mini atau yang di kenal dengan BTS (*Base Transceiver Station*). Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) merupakan hasil dari program Kementerian Telekomunikasi dan Informatika yaitu KPU/USO. Program KPU/USO telah ada di Kalimantan Barat pada tahun



2015. Namun, dalam proses pengajuan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga di desa Sungai Uluk Palin dapat terbangun pada tahun 2016. Setelah pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Desa Sungai Uluk Palin khususnya pada masalah komunikasi dan informasi. Adanya BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Sungai Uluk Palin memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, permasalahan masih sama seperti pada desa lain yang telah terbangun BTS (*Base Transceiver Station*) bahwa kapasitas dari BTS (*Base Transceiver Station*) hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan informasi masyarakat melalui via telepon dan SMS (*Short Message Service*/layanan pesan singkat). Sedangkan untuk mengakses internet belum dapat dilakukan.

#### 5. Potensi

Potensi yang di miliki oleh Desa Sungai Uluk Palin juga berada pada sektor pertanian. Dimana dari 2.808 ha luas wilayah terdapat 600 ha lahan yang digunakan untuk pertanian dan 500 ha untuk perkebunan. Namun, Desa Sungai Uluk Palin belum melakukan pendataan mengenai potensi alam yang menjadi komoditas di desa Sungai Uluk Palin. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Desa Sungai Uluk Palin

ibu Jumaisiah Herlina mengemukakan bahwa warga masyarakat memiliki mata pencarian yang macam-macam seperti bertani, berkebun, berdagang dan pegawai negeri. Namun, mata pencarian utama masyarakat Desa Sungai Uluk Palin bertani.

## 4.2 Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Penyajian Data dan Fokus Penelitian menampilkan data hasil penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang dilakukan peneliti. Dimana fokus penelitian ini adalah penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi yang akan membahas mengenai proses pembangunan akses informasi masyarakat perbatasan, penyediaan sumber daya, dan peran *Stakeholder*. Kemudian Faktor penghambat dan pendukung dalam proses pembangunan akses informasi masyarakat perbatasan melalui penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya fokus penelitian yang terakhir dalam penelitian ini adalah dampak pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi yang membahas mengenai terbukanya akses informasi masyarakat dan pengurangan *Blankspot Area* di Kabupaten Kapuas Hulu. Supaya lebih jelas berikut penjabaran penyajian data dan fokus penelitian :

### 4.2.1 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi bertujuan untuk membuka akses informasi masyarakat perbatasan dan mengurangi *Blankspot Area*. Pembangunan jaringan telekomunikasi

dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu berupa pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*). Berikut merupakan proses penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### 1. Proses Pembangunan

Pada proses pembangunan terdapat tiga tahapan pembangunan, yaitu :

##### (1) Perencanaan

Penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan. Jaringan telekomunikasi dan informasi menjadi penting dalam pembangunan sebagai pendukung dalam pembangunan terutama dalam pembangunan masyarakat. Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang memiliki 281 desa. Namun, dari jumlah seluruh desa yaitu 281 terdapat 276 desa yang tidak memiliki jaringan telekomunikasi dan informasi. Sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi dan informasi di jaman sekarang ini semakin meningkat. Oleh karena itu, berdasarkan pada Nawacita Presiden 2014-2019 mengenai pembangunan dimulai dari pinggir maka Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat suatu program yaitu Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* atau yang di singkat KPU/USO. KPU/USO merupakan program dimana pemerintah wajib untuk

memberikan layanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika kepada publik. Program KPU/USO merupakan program yang diadakan oleh Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau disingkat BP3TI. Sedangkan BP3TI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informasi. BP3TI dibentuk pada tahun 2010 yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana program pemerintah Republik Indonesia di bidang telekomunikasi dan informasi. Adapun program yang dimaksud adalah Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation atau disingkat KPU/USO. Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam program KPU/USO seperti penyediaan internet melalui program internet cepat, penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi melalui pembangunan tower mini BTS (*Base Transceiver Station*) dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan mengurangi kesenjangan komunikasi dan informasi di Indonesia.

Penetapan wilayah Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) ditetapkan dalam Surat Keputusan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Adapun isi dari Surat Keputusan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Nomor : 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan

Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan wilayah tertentu sebagai Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT). Sebagaimana telah tercantum dalam surat keputusan Lampiran Keputusan Menteri ini.
- b. WPUT sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA di susun berdasarkan usulan :
  - 1) Pemerintah Daerah
  - 2) Instansi terkait, dan/atau
  - 3) Masyarakat
- c. Penentuan WPUT dilakukan setelah usulan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA di evaluasi berdasarkan data potensi desa dari Badan Pusat Statistik dengan mempertimbangkan kondisi sebagai berikut :
  - 1) Belum tersedia jaringan telekomunikasi, dan/atau
  - 2) Belum tersedia layanan telekomunikasi berbasis komunal seperti telepon umum atau warung telekomunikasi.
- d. Terhadap WPUT sebagaimana di maksud dalam Diktum PERTAMA akan dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan wilayah tersebut.

Berkaitan dengan Surat Keputusan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Bapak Zulkipli Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Komunikasi Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa :

“Program Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) merupakan program pemerintah pusat. BTS (*Base Transceiver Station*) bertujuan untuk membuka akses daerah yang tidak memiliki sinyal dan wilayah 3T (terdepan, terpencil dan terluar)” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi)

Hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan dari Bapak Muhammad Yamin Kepala Divisi Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“Pada pembangunan BTS terdapat ketentuan yang telah di tetapkan oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika bahwa daerah yang di prioritaskan dalam pembangunan BTS adalah wilayah yang tidak memiliki sinyal dan tidak memiliki fasilitas teleomunikasi”. (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi)

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Nomor : 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi menetapkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu termasuk dalam Wilayah yang dimaksudkan pada Surat Keputusan poin ke tiga. Namun, di tujukan untuk wilayah 3T (terdepan, terpencil dan terluar). Data dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bahwa dari 281 desa terdapat 276 desa di Kabupaten Kapuas Hulu

yang tidak memiliki jaringan untuk berkomunikasi dan tergolong sebagai wilayah 3T (terdepan, terpencil dan terluar). Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut BP3TI (Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) merencanakan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) yaitu berupa tower mini di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) dilakukan sejak tahun 2015 dan pada tahun 2016 telah mulai terbangun BTS (*Base Transceiver Station*) di beberapa daerah 3T dan *Blankspot Area* di Kapuas Hulu. Kapasitas Satu unit Tower mini ini memiliki kapasitas jaringan yang masih terbatas dan hanya mampu menjangkau maksimal lima kilometer dari tempat berdirinya. Sinyal yang dihasilkan dari Satu unit Tower mini ini memiliki kapasitas jaringan yang masih terbatas yaitu 2-G dan hanya mampu menjangkau maksimal lima kilometer dari tempat Sehingga hanya dapat digunakan untuk telepon dan SMS. Pendapat mengenai Kapasitas jaringan BTS (*Base Transceiver Station*) di sampaikan oleh Bapak Yohanes Husin Pejabat Sementara (Kepala Desa) Sungai Uluk Palin, bahwa :

“Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Sungai Uluk Palin, Kabupaten Kapuas Hulu sudah beroperasi sejak 2016. Namun saat ini fungsi BTS (*Base Transceiver Station*) hanya terbatas untuk melakukan telpon dan SMS”. (Rabu, 7 Februari 2018, Kantor Camat Putussibau Utara)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Ibu Jumaisiah Warga Desa Sungai Uluk Palin, sebagai berikut :

“Kualitas sinyal yang dihasilkan BTS (*Base Transceiver Station*) cukup baik jika dibandingkan sebelum adanya BTS (*Base Transceiver Station*) sama sekali tidak dapat berkomunikasi keluar. Namun, di desa Sungai Uluk Palin tidak semua lokasi didesa ini yang terjangkau oleh sinyal BTS (*Base Transceiver Station*)” (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Sungai Uluk Palin)

Menanggapi pendapat Bapak Yohanes Husin dan Ibu Jumaisiah Herlina mengenai kapasitas dan jangkauan BTS (*Base Transceiver Station*), Pak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informasi mengemukakan sebagai berikut :

“Pada saat ini sementara BTS (*Base Transceiver Station*) hanya dapat dimanfaatkan untuk SMS dan Telpon karena BTS (*Base Transceiver Station*) yang terbangun saat ini hanya dapat menghasilkan sinyal 2-G. Namun, untuk kedepannya kami sudah memiliki target untuk meningkatkan kapasitas sinyal menjadi 3-G atau bahkan 4-G. Tapi hal tersebut juga membutuhkan proses. Selain itu, BTS (*Base Transceiver Station*) untuk membuka akses informasi dan merupakan salah satu cara pemerintah untuk memancing provider atau perusahaan swasta untuk membangun sarana jaringan telekomunikasi dan informasi di daerah *Blankspot*. (Selasa, 20 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) bertujuan untuk membuka akses informasi masyarakat dan mengurangi *Blankspot Area*. Oleh karena itu, dengan kapasitas dan jangkauan dari BTS (*Base Transceiver Station*) yang masih terbatas diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sinyal komunikasi.



Selain itu, perlu juga di lakukan peningkatan kapasitas BTS (*Base Transceiver Station*) agar benar-benar mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sinyal.

## (2) Penganggaran

Penganggaran Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) dilakukan oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Adapun penganggaran tersebut berupa anggaran pembelian perangkat, proses pembangunan dan penyediaan BTS (*Base Transceiver Station*) merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sutik Kepala Divisi Statistik, sebagai berikut :

“Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) merupakan program Kementerian Telekomunikasi dan Informatika sehingga seluruh pembiayaan program ini di biayai oleh pemerintah pusat” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informatika, yaitu :

“BTS (*Base Transceiver Station*) di bangun dengan menggunakan dana APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang menjadi tanggungjawab dari Kementerian Komunikasi dan Informatika” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Penggunaan dana ini menjadi

tanggung jawab dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan. Setelah BTS (*Base Transceiver Station*) setiap desa diberikan biaya perawatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Husin Pejabat Sementara (Kepala Desa) Sungai Uluk Palin sebagai berikut :

“Untuk biaya perawatan desa Sungai Uluk Palin diberikan uang sebesar Rp 250.000,- . Uang tersebut dianggarkan setiap bulan sebagai biaya perawatan perangkat BTS (*Base Transceiver Station*).” (Rabu, 7 Februari 2018, Kantor Camat Putussibau Utara)

Hal ini serupa juga disampaikan oleh Bapak Yohanes Kelen Sekretaris Desa Lauk, sebagai berikut :

“Setelah BTS (*Base Transceiver Station*) terbangun desa kami diberikan uang Rp 250.000 sebagai biaya perawatan. Uang tersebut diberikan pada saat pihak penyedia melakukan pemeriksaan terhadap perangkat BTS (*Base Transceiver Station*).” (Rabu, 7 Februari 2018, Kediaman Pak Kelen di Pala Pulau).

Jadi, dalam hal ini masyarakat dilibatkan untuk melakukan perawatan terhadap bangunan BTS (*Base Transceiver Station*). Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi memberikan uang sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah kepada warga untuk biaya perawatan BTS (*Base Transceiver Station*).

### (3) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang akan menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) dari awal hingga akhir pembangunan. Agar lebih jelas berikut tahapan dalam pelaksanaan pembangunan :

#### 1) Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Pengajuan

Tahap pengajuan adalah tahapan dimana suatu desa mengajukan desanya untuk dibangun BTS (*Base Transceiver Station*). Pada tahap pengajuan ini pemerintah desa membuat proposal dan juga melengkapi beberapa dokumen. Tahapan pengajuan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutik Kepala Divisi Statistik, sebagai berikut :

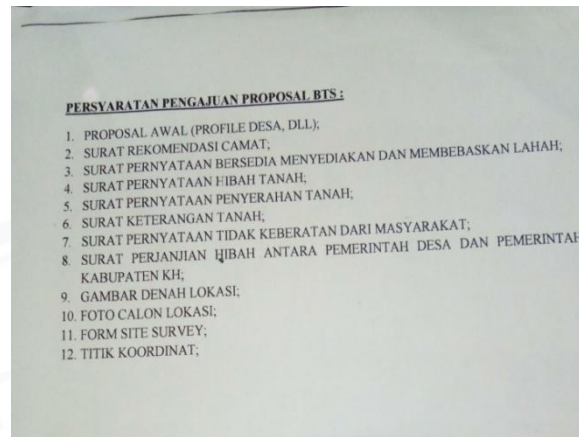
“Tahapan pertama dalam pembangunan BTS di Kabupaten Kapuas Hulu adalah pengajuan. Tahap pengajuan ini penting sebagai dasar utama dalam penentuan apakah desa tersebut layak atau tidak. Pada pengajuan usulan pembangunan BTS suatu desa membuat sebuah proposal dan membawa persyaratan yang telah ditentukan”. (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Yohanes Kelen Sekretaris Desa Lauk, sebagai berikut :

“Jadi saya jelaskan secara ringkas mengenai tahapan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk. Pertama saya beserta beberapa perangkat desa lainnya mengajukan proposal yang berisi profil desa kami beserta beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu”. kata Pak Yohanes Kelen Sekretaris Desa Lauk pada saat di wawancarai oleh Rabu, 7 Februari 2018

Adapun persyaratan dalam pengajuan proposal pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) yang di keluarkan

oleh Dinas Telekomunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :



**Gambar 4.6** Persyaratan Pengajuan Proposal BTS (*Base Transceiver Station*)

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu*

Setelah melengkapi persyaratan tersebut, proposal dan seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk di serahkan ke BP3TI (Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika). Proposal yang digunakan oleh Desa untuk mengajukan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) harus berdasarkan data yang benar. Pengajuan usulan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di lakukan pada periode tertentu, biasanya satu tahun sekali.

#### b. Tahap Seleksi

Setelah seluruh persyaratan di lengkapi oleh desa yang ingin mengajukan desanya untuk dibangun BTS (*Base Transceiver*

*Station*) seluruh dokumen persyaratan diserahkan ke BP3TI (Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) untuk diseleksi. Pada tahap seleksi ini BP3TI melakukan survey awal. Survey awal yaitu dengan melakukan perbandingan data yang di sajikan dalam proposal dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sutik Kepala Divisi Statistik yang ikut mengurus pengusulan pembanguna BTS, sebagai berikut :

“Sebelum melaksanakan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) BP3TI melakukan seleksi awal yaitu dengan perbandingan data untuk membuktikan kebenaran data”. (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informatika Bapak Zulkipli, sebagai berikut :

“BP3TI melakukan beberapa tahapan seleksi untuk menentukan Desa mana yang akan di jadikan prioritas dan akan dibangun BTS” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Perbandingan di lakukan untuk memastikan bahwa data yang di sajikan dalam proposal adalah data yang benar. Setelah melakukan perbandingan data, BP3TI menyeleksi desa-desa tersebut dengan mempertimbangkan hasil perbandingan dan kesesuaian dengan penetapan wilayah pelayanan universal yang ditetapkan oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika melalui Surat Keputusan Nomor 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang

Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi. Pada tahap ini, jumlah desa yang mengajukan pembangunan akan mengalami pengerucutan. Namun, seluruh desa yang sudah terpilih pada tahap ini belum tentu mendapatkan pembangunan pada periode ini, dan desa yang tidak terpilih pun dalam seleksi ini bukan berarti tidak akan dibangun BTS (*Base Transceiver Station*). Akan tetapi, karena keterbatasan biaya dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di batasi jumlahnya dalam satu periode. Hal ini disampaikan oleh Pak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informatika, sebagai berikut :

“Pada satu periode BP3TI telah memberikan kuota jumlah BTS yang akan dibangun pada masing-masing daerah. Penentuan kuota ini diberlakukan karena terbatasnya biaya sehingga dengan adanya seleksi dapat menentukan desa mana yang akan di dahulukan dalam pembangunan periode ini” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Muhammad Yamin sebagai berikut :

“Jumlah pembangunan BTS pada setiap daerah telah ditentukan oleh BP3TI dengan memberikan kuota pada setiap periode pembangunannya” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Oleh karena itu, adanya penentuan desa-desa yang diprioritaskan untuk dibangun BTS (*Base Transceiver Station*). Dimana desa yang di perioritaskan adalah desa yang termasuk sebagai daerah terluar, tertinggal dan terpencil atau yang disebut 3T. Sehingga, pada akhirnya desa yang akan dibangun BTS tidak hanya

desa yang melingkupi persyaratan yang sudah di tentukan tetapi desa yang benar-benar membutuhkan atau di prioritaskan seperti desa yang termasuk 3T dan *Blankspot Area*.

c. Tahap Observasi Lapangan

Tahap observasi lapangan merupakan tahapan yang dilakukan BP3TI (Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) setelah melakukan tahap seleksi. Pada tahap observasi lapangan BP3TI bekerjasama dengan pihak swasta yang berperan menyediakan dan mengoperasikan perangkat BTS (*Base Transceiver Station*). BP3TI bersama pihak swasta melakukan observasi langsung yaitu dengan mendatangi desa-desa yang sudah di seleksi ditahap sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sutik sebagai berikut:

“Sebelum melakukan pembangunan BTS, BP3TI bersama pihak provider melakukan observasi lapangan untuk melihat langsung kondisi lahan yang telah disediakan apakah layak untuk dibangun atau tidak” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu).

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Yohanes Kelen Sekretaris Desa Lauk, sebagai berikut :

“Setelah di seleksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika, BP3TI dan Provider mendatangi desa kami untuk melakukan observasi di lahan yang sudah kami sediakan” (Minggu,18 Februari 2018, kantor Desa Lauk)

Observasi Lapangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa desa yang sudah di seleksi benar-benar membutuhkan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*). Observasi Lapangan ini juga

bertujuan untuk kepentingan pembangunan secara teknis seperti struktur lahan dan lainnya. Pada tahap inilah yang akan menentukan apakah desa tersebut layak dibangun atau tidak. Hasil observasi lapangan ini akan menjadi pertimbangan untuk melanjutkan pada tahan selanjutnya.

d. Tahap Persetujuan

Setelah melalui tahap seleksi dan observasi lapangan maka di peroleh beberapa desa yang akan di bangun BTS (*Base Transceiver Station*). Daftar desa-desa yang sudah terpilih dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) akan di serahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk di informasikan kepada desa-desa yang sudah mengajukan. Kemudian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik di lakukanlah koordinasi, pengawasan dan pengendalian. Berikut merupakan daftar desa yang akan dibangun BTS (*Base Transceiver Station*) pada periode 2017.

**Tabel 4.1** Lokasi yang akan dibangun BTS (Base Transceiver Station) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016

NO	LOKASI	KETERANGAN
1	Sungai Uluk Palin	Proses Pembangunan
2	Lauk	Proses Pembangunan
3	Bungan Jaya	Proses Pembangunan
4	Kareho	Proses Pembangunan
5	Rantau Prapat	Proses Pembangunan
6	Ulak Pauk	Proses Pembangunan
7	Kantuk Asam	Proses Pembangunan
8	Pamtas Kantuk Asam	Proses Pembangunan
9	Malemba	Proses Pembangunan
10	Sungai Senunk	Proses Pembangunan
11	Labian	Proses Pembangunan

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik



e. Pembangunan

Pada tahap ini desa yang sudah terpilih akan di lakukan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) oleh pihak swasta yang menjadi penyedia dan pengelola jaringan BTS. Pada tahap pembangunan, terdapat tahap lain yang harus di penuhi sebelum melakukan pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informasi sebagai berikut :

“Tahapan dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) terbagi menjadi tiga tahapan yaitu penyiapan lahan, perizinan, dan pelaksanaan pembangunan” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Adapun tahapan yang di lakukan pada pasca pembangunan hingga pembangunan BTS berlangsung adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan lahan yang akan di bangun BTS (*Base Transceiver Station*). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2005 tentang pedoman pembangunan menara bersama Telekomunikasi menyebutkan bahwa Menara Komunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Oleh karena itu, pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapus Hulu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan syarat utama bagi desa yang ingin mengajukan pembangunan BTS di

desanya yaitu dengan menyediakan lahan. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pemerintah Daerah tidak memberikan ganti rugi atau uang sewa atas lahan yang digunakan untuk pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*). Pada tahapan pengajuan pemerintah desa dan masyarakat desa yang akan mengajukan desanya untuk di bangun BTS harus sudah menyediakan lahan yang sudah di hibahkan beserta surat keterangan hibah tanah. Adapun luas lahan yang harus disediakan oleh masyarakat desa kurang lebih 200 m<sup>2</sup>. Lahan tersebut akan di bangun 1 unit menara dan beberapa perangkat yang akan menunjang kinerja dari menara mini BTS (*Base Transceiver Station*).

b) Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lainnya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2005 tentang pedoman pembangunan menara bersama Telekomunikasi bahwa dalam pembangunan menara atau tower komunikasi memutuskan sebagai berikut :

(a) Pembangunan menara dapat di lakukan oleh :

- 1) Penyelenggara telekomunikasi,
- 2) Penyedia menara, dan/atau
- 3) Kontraktor menara

- (b) Pembangunan menara harus memiliki izin mendirikan menara dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (c) Pemberian izin sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (d) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama.
- (e) Informasi sebagaimana di maksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan tersebut maka pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) juga harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan atau IMB layaknya pembangunan infrastruktur pada umumnya. Proses perizinan ini diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan.

### c) Tahapan Pembangunan

Berikut merupakan tahap pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) pada dua desa yang menjadi fokus pada penelitian ini, sebagai berikut

#### (1) Desa Lauk

Desa Lauk Kecamatan Putussibau Utara, mengusulkan desanya dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) pada tahun 2015. Pada awal tahun 2016 BTS (*Base Transceiver Station*) terbangun di desa ini. Proses pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk dijelaskan oleh Bapak Yohane Kelen sebagai berikut :

“Awal proses mengajukan pada tahun 2015 saya bersama beberapa perangkat desa lainnya membuat proposal yang berisikan profil desa Lauk. Meskipun data mengenai profil desa Lauk belum lengkap sepenuhnya karena adanya keterbatasan tetapi kami berusaha maksimal untuk melengkapi data-data tersebut. Pada saat mempersiapkan berkas pengajuan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*), mereka harus bekerja ekstra dan mengalami berbagai kendala. Desa Lauk belum memiliki fasilitas listrik sehingga inilah yang menjadi kendala kami dalam bekerja. Salah satu cara yang dilakukan mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kami pergi ke Putussibau, mengerjakan dan menyelesaikan seluruh persyaratan pengajuan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) disana. Setelah menunggu beberapa bulan akhirnya pada akhir tahun 2016 BTS terbangun di desa kami” (Minggu, 18 Februari 2018, Kantor Desa Lauk)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Bustami mantan kepala

Desa Lauk tahun 2012-2017 sebagai berikut :

“Kami membuat dan mengajukan proposal pada tahun 2015. Kami menyusun proposal dengan data seadanya dan kami juga melakukan musyawarah desa untuk menentukan lahan mana yang akan di

hibahkan untuk membangun BTS. Dari hasil musyawarah desa tersebut akhirnya lahan yang di hibahkan berada di samping kantor Desa Lauk. Setelah itu perangkat desa beserta seluruh masyarakat membuat surat pernyataan bersedia untuk memberikan lahan” (Minggu, 18 Februari 2018, Kantor Desa Lauk)

Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Yohanes Kelen dan Bapak Bustami dapat disimpulkan bahwa pengajuan pembangunan (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk telah dilakukan sejak 2015. Selain mempersiapkan proposal, pemerintah desa dan warga masyarakat Desa Lauk melakukan musyawarah menentukan lahan yang akan di hibahkan.



**Gambar 4.7** Musyawarah tentang Tanah Hibah Desa Lauk  
*Sumber : Dokumentasi Desa Lauk*

Berikut merupakan gambar bangunan tower BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk :



**Gambar 4.8** Bangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk

*Sumber : Dokumentasi Peneliti*

Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Yohanes Kelen Sekretaris Desa Lauk sebagai berikut :

“Waktu pengerjaan pembangunan fisik BTS memakan waktu kurang lebih satu bulan kerja” (Rabu, 18 Februari 2018, Kantor Desa Lauk)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“Proses pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) pada satu desa kurang lebih satu bulan. Sebelumnya desa tersebut harus menunggu selama setahun sampai perangkat BTS (*Base Transceiver Station*) sampai didesa mereka, kemudia para teknisi akan membangun dalam waktu satu bulan” (Selasa, 20 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk adalah

setahun masa pemesanan perangkat BTS (*Base Transceiver Station*) dan sebulan masa pengerjaan.

(2) Desa Sungai Uluk Palin

Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara, mengusulkan desanya dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) pada tahun 2015. Pada awal tahun 2016 BTS (*Base Transceiver Station*) terbangun di Sungai Uluk Palin. Proses pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Sungai Uluk Palin dijelaskan oleh Bapak Nikolaus Yuser sebagai berikut :

“Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Sungai Uluk Palin dimulai pada tahun 2016. Desa kami mengusulkan sejak tahun 2015. Pada pengusulan desa untuk bangun BTS (*Base Transceiver Station*) kami diwajibkan untuk membuat proposal, dan beberapa persyaratan yang harus di penuhi terutama penyediaan lahan” (Minggu, 18 Februari 2018 Kantor Desa Sungai Uluk Palin)

Pernyataan Bapak Nikolaus Yuser di dukung oleh Bapak Yohanes Alon, sebagai berikut :

“Pada akhir tahun 2015 kami membuat proposal yang berisikan profil Desa Sungai Uluk Palin. Kemudian kami melakukan musyawarah untuk menentukan lahan mana yang akan di hibahkan untuk pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*). Setelah disepakati bersama seluruh masyarakat Sungai Uluk Palin, Bapak Edi B.S pada saat itu menjabat menjadi kepala Desa Sungai Uluk Palin memutuskan untuk membangun BTS di belakang kantor desa Sungai Uluk Palin” (Minggu, 18 Februari 2018 Kantor Desa Sungai Uluk Palin)

Proses pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) adalah berkisar selama kurang lebih satu bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nikolaus Yuser yaitu :

“Pembangunan BTS di Desa Sungai Uluk Palin yaitu sekitar satu bulanan” (Minggu, 18 Februari 2018 Kantor Desa Sungai Uluk Palin)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Zulkipli Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“Proses pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) pada satu desa kurang lebih satu bulan. Sebelumnya desa tersebut harus menunggu selama setahun sampai perangkat BTS (*Base Transceiver Station*) sampai didesa mereka, kemudia para teknisi akan membangun dalam waktu satu bulan” (Selasa, 20 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Berikut merupakan gambar perangkat dan bangunan tower BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Sungai Uluk Palin :



**Gambar 4.9** Bangunan BTS (*Base Transceiver Station*) Desa Sungai Uluk Palin

*Sumber : Dokumentasi Peneliti*

Sejak pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 terdapat 74 usulan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*). Namun, dari 74 usulan tersebut hingga November 2017 telah terbangun 19 unit BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga saat ini tersisa 55 usulan yang harus di selesaikan hingga akhir tahun 2019. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Zulkipli Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :



“Total usulan pada tahun 2016 adalah 74 desa usulan, pada tahun 2016 terbangun 11 unit BTS pada 11 Desa. Kemudian Pada tahun 2017 terbangun 8 unit BTS pada 8 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

**Tabel 4.2** Daftar BTS yang sudah terbangun dari tahun 2016-2017

No	DESA/KECAMATAN	TAHUN DIBANGUN
1	Sungai Uluk Palin/Putussibau Utara	2016
2	Lauk/Putussibau Utara	2016
3	Nanga Lauk/Embaloh Hilir	2017
4	Ulak Pauk/Embaloh Hulu	2016
5	Rantau Prapat/Embaloh Hulu	2016
6	Ujung Said/Jongkong	2017
7	Tani Makmur/Hulu Gurung	2017
8	Sekuba/Selimbau	2017
9	Setulang/Batang Lupar	2017
10	Labian/Batang Lupar	2016
11	Malemba/Batang Lupar	2016
12	Sungai Senunuk/Batang Lupar	2016
13	Pulau Majang/Badau	2017
14	Riam Tapang/Silat Hulu	2017
15	Kareho/Putussibau Selatan	2016
16	Bungan Jaya/Putussibau Selatan	2016
17	Nanga Boyan/Boyan Tanjung	2017
18	Nanga Jemah/Boyan Tanjung	2017
19	Kantuk Asam/Puring Kencana	2016

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2017*

Setelah terbangun 19 unit BTS (*Base Transceiver Station*) pada 19 desa di Kabupaten Kapuas Hulu. Bapak Zulkipli menyampaikan target pembangunan BTS sebagai berikut :

“Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) bertujuan untuk membuka akses daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dimana Kabupaten Kapuas Hulu termasuk dalam kategori Kabupaten yang memiliki banyak daerah 3T yang berada di sekitar wilayah perbatasan. Kapasitas BTS (*Base Transceiver Station*) yang dibangun di Kabupaten Kapuas Hulu hanya terbatas pada jaringan 2-G (generasi kedua). Kapasitas jaringan yang di hasilkan oleh

jaringan 2-G (generasi dua) standar dan cenderung kecepatan rendah-menengah. Selain itu, luas jangkauan dari BTS (*Base Transceiver Station*) adalah sekitar 4-5 km. Sehingga, jika di bayangkan dengan jumlah wilayah dan jumlah penduduk yang cukup banyak. BTS (*Base Transceiver Station*) belum mampu memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi masyarakat Desa Lauk. Sehingga Pak Zulkipli memiliki target bahwa setelah seluruh usulan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu terbangun. Akan mengusahakan meningkatkan kapasitas dari 2-G (generasi dua) beralih ke 3-G (generasi tiga) atau bahkan 4-G (generasi empat). Akan tetapi itu bukanlah tujuan utama, tujuan utama adalah persebaran jaringan telekomunikasi dapat di rasakan seluruh wilayah yang ada di Kapuas Hulu terutama *Blankspot Area*. (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Pernyataan tersebut di dukung Bapak Muhammad Yamin, sebagai berikut

“Target utama dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) adalah untuk menghilangkan *Blankspot Area* yang ada di daerah perbatasan. Tujuan lainnya yaitu untuk peningkatan kapasitas informasi masyarakat dengan memberikan fasilitas untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari luar. Sehingga masyarakat daerah perbatasan tidak lagi *terkungkung* di dalam keterbatasan dan dapat bangkit membangun daerahnya” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkipli dan Bapak Muhammad Yamin dapat disimpulkan bahwa target ke depan mengenai pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu adalah meningkatkan data kualitas, kapasitas dan jangkauan dari BTS tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan jaringan telekomunikasi dan informatika masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh.

Agar lebih jelas lagi mengenai pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) berikut merupakan proses pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) serta pemanfaatan BTS pada dua desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana dua desa ini sedang mulai berkembang dengan adanya BTS.

## 2. Penyediaan Sumber Daya

Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) tentunya membutuhkan penyediaan sumber daya untuk mendukung proses pembangunannya. Oleh karena itu berikut merupakan penjabaran sumber daya yang di sediakan dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) sebagai berikut :

### (1) Infrastruktur

Pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi pada suatu daerah merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, berikut merupakan hasil rekapitasi penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

**Tabel 4.3** Rekapitulasi Sarana Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	SUDAH TERBANGUN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN	KETERANGAN	
				SWASTA	KPU/USO
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	6	4	2
2	BIKA	8	2	2	0
3	EMBALOH HILIR	9	2	1	1
4	EMBALOH HULU	10	4	2	2
5	BUNUT HILIR	11	1	1	0
6	BUNUT HULU	15	2	2	0
7	JONGKONG	14	1	0	1
8	HULU GURUNG	15	6	5	1
9	SELIMBAU	17	4	3	1
10	SEMITAU	12	0	0	0
11	SEBERUANG	15	3	3	0
12	BATANG LUPAR	10	5	1	4
13	EMPANANG	6	1	1	0
14	BADAU	9	2	1	1
15	SILAT HILIR	13	4	4	0
16	SILAT HULU	14	2	1	1
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	7	5	2
18	KALIS	17	1	1	0
19	BOYAN TANJUNG	16	3	1	2
20	MENTEBAH	8	1	1	0
21	PENGGADAN	11	1	1	0
22	SUHAI	11	1	1	0
23	PURING KENCANA	6	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>282</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>19</b>

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan data rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 282 desa. Dari total 282 desa tersebut telah tersedia 60 sarana infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika. Penyedia jaringan telekomunikasi dan informatika tersebut terbagi menjadi dua yaitu swasta dan KPU/USO. 41 dari total 60 sarana infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika yang tersedia di Kabupaten Kapuas Hulu disediakan oleh pihak swasta yaitu Telkomsel dan Indosat. Sedangkan sisanya 19 sarana infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika disediakan oleh KPU/USO berupa BTS. Namun, masih terdapat 128 desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang belum memiliki sinyal komunikasi dan informatika. Agar lebih jelas berikut merupakan data yang

menunjukkan ketersediaan sinyal komunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

**Tabel 4.4** Rekapitulasi Sinyal Telepon Kabupaten Kapuas Hulu 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	Sinyal Telepon		
			Ada	Lemah	Tidak Ada
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	14	2	3
2	BIKA	8	6	1	1
3	EMBALOH HILIR	9	3	0	6
4	EMBALOH HULU	10	6	0	4
5	BUNUT HILIR	11	3	2	6
6	BUNUT HULU	15	7	0	8
7	JONGKONG	14	7	2	5
8	HULU GURUNG	15	11	3	1
9	SELIMBAU	17	8	1	7
10	SEMITAU	12	4	0	8
11	SEBERUANG	15	9	0	6
12	BATANG LUPAR	10	9	0	1
13	EMPANANG	6	1	0	5
14	BADAU	9	2	0	7
15	SILAT HILIR	13	10	0	3
16	SILAT HULU	14	8	0	6
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	12	0	4
18	KALIS	17	9	0	8
19	BOYAN TANJUNG	16	9	0	7
20	MENTEBAH	8	3	0	5
21	PENKADAN	11	3	0	8
22	SUHAIID	11	5	0	6
23	PURING KENCANA	6	3	0	3
	<b>TOTAL</b>	<b>282</b>	<b>152</b>	<b>11</b>	<b>118</b>

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 152 desa yang sudah memiliki sinyal komunikasi yang bagus, 11 desa yang memiliki sinyal komunikasi yang lemah dan 118 desa yang desa yang tidak memiliki sinyal sama sekali atau *Blankspot Area*. Oleh karena itu, jumlah desa yang membutuhkan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Kapuas Hulu adalah 118 desa.

## (2) Sumber Daya Manusia

Suatu pembangunan membutuhkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) tentunya membutuhkan sumber daya manusia. Hal tersebut seperti di sampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin Kepala Divisi Aplikasi Informasi sebagai berikut :

“Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu melibatkan peran sumber daya manusia, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga pihak swasta” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Kapuas Hulu)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Yohanes Kelen sekretaris Desa Lauk sebagai berikut :

“Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) melibatkan banyak pihak seperti pemerintah daerah, dinas-dinas, provider dan masyarakat. (Minggu, 18 Februari 2018 , Kantor Desa Lauk)

Adapun Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah
- 2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- 4) Dinas Lingkungan Hidup
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 7) Swasta
- 8) Teknisi

9) *Sitte Kipper* (Penjaga BTS)

10) Masyarakat

Seluruh sumber daya tersebut bekerja sama untuk melaksanakan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### 3. Peran *Stakeholder*

Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tidak bekerja sendiri. Namun, terdapat *Stakeholder* lain yang membantu dalam penyelenggaraan program pembangunan BTS sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Adapun *Stakeholder* yang terkait beserta tugasnya :

#### (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pembangunan yaitu Koordinator dan Pembina. Tugas Pemerintah Daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi pemerintah daerah yaitu melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan pada kegiatan pembangunan daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Sutik Kepala Divisi Statistika sebagai berikut:

“Pemerintah berperan sebagai koordintor sekaligus sebagai fasilitator bagi setiap program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)

Oleh karena itu, tugas Pemerintah Daerah Pada Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Koordinator dan Pembinaan.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Peranan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pembangunan BTS adalah sebagai fasilitator. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sutik Kepala Divisi Statistika sebagai berikut:

“Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) sebagai fasilitator bagi masyarakat (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Berdasarkan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memfasilitasi desa-desa dalam proses pengajuan pembangunan BTS. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memfasilitasi hubungan masyarakat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*).

(3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam program pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin Kepala Divisi Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) adalah mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) secara teknis



sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Berdasarkan hal tersebut tugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas pokoknya yaitu pembinaan, pengendalian dan koordinasi dalam pembangunan secara teknis.

#### (4) Dinas Lingkungan Hidup

Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pembangunan BTS adalah melakukan pembinaan dan pengendalian pada pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin sebagai berikut :

“Pembangunan tentunya harus memperhatikan masa yang akan datang, dengan adanya keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) akan membantu dalam pengaturan zonasi agar tidak membahayakan masyarakat” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Pembangunan harus memperhatikan zonasi, lokasi dan memperhatikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran Dinas Lingkungan Hidup juga di perlukan dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*).

#### (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merumuskan perencanaan berkaitan dengan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*), serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan BTS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut

dijelaskan oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi

Informasi sebagai berikut :

“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan sehingga berjalan sesuai dengan rencana pembangunan. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan untuk menyusun rencana pembangunan untuk kedepannya” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

(6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan merumuskan program perencanaan untuk masyarakat dalam rangka pemanfaatan BTS. Program perencanaan tersebut yaitu pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan BTS (*Base Transceiver Station*). Namun, sejak terbangunnya BTS (*Base Transceiver Station*) belum terdapat program pembangunan masyarakat berkaitan dengan BTS (*Base Transceiver Station*). Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Alfian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

“Belum ada program khusus bagi masyarakat berkaitan dengan pembangunan BTS. Belum adanya program khusus pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan BTS ini adalah karena belum ada penugasan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pemberdayaan. Hal ini mungkin karena program tersebut berasal dari pusat sehingga program tersebut diadakan oleh pemerintah pusat. Namun, untuk rencana kedepan mungkin akan ada program khusus untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan Tower BTS dengan memanfaatkan Dana Desa atau jika pemerintah pusat membuat suatu program kami siap untuk membantu jalannya program pembangunan masyarakat tersebut” (Jumat, 29 Desember 2017, Gedung Olahraga Putussibau Utara dalam acara Bursa Inovasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa belum adanya program khusus dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*).

(7) Swasta

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) melibatkan peran swasta di dalam pembangunan BTS. Peranan pihak swasta dalam pembangunan BTS adalah sebagai penyedia perangkat dan layanan. Dimana pihak swasta tersebut bertanggung jawab juga dalam pengelolaan dan kualitas jaringan. Hal tersebut disampaikan oleh Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

“BP3TI membiayai penyediaan transmisi, power dan tower serta operator selular, pemda meminjamkan lahan, dan operator selular menyediakan dan mengoperasikan perangkat BTS” (Rabu, 28 Desember 2016, Desa Kantuk Asam, Puring Kencana dalam acara Peresmian BTS di Kabupaten Kapuas Hulu)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“Adapun pihak swasta yang berperan dalam pembangunan BTS di Desa Lauk dan Sungai Uluk Palin adalah PT. Telkom. PT. Telkom berperan dalam penyedia jasa transmisi VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) dan Powernya”. (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak swasta berperan sebagai penyedia perangkat dan provider pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*).

(8) Teknisi

Peran Teknisi dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) adalah untuk melakukan perakitan dan mengelola kinerja dari BTS (*Base Transceiver Station*). Hal ini disampaikan oleh Bapak Sutik Kepala Divisi Statistik sebagai berikut :

“Tugas untuk melakukan pembangunan dalam arti merakit dan mengelola kinerja dari BTS (*Base Transceiver Station*) adalah teknisi yang disediakan oleh pihak swasta. Artinya Pemerintah tidak campur tangan dalam hal ini seluruh tanggungjawab dalam proses teknis kinerja BTS diserahkan kepada pihak provider sebagai penyedia layanan, jika ada kerusakan atau gangguan maka pihak provider yang akan mengatasi permasalahan tersebut secara langsung” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu).

(9) *Sitte Kipper*

*Sitte Kipper* atau penjaga merupakan orang yang di percayakan untuk menjaga BTS (*Base Transceiver Station*) adapun peran *Sitte Kipper* di jelaskan oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informasi sebagai berikut :

“*Sitte Kipper* bertanggung jawab untuk memantau sistem kinerja BTS dan jika terjadi kerusakan atau gangguan sinyal maka *Sitte Kipper* yang akan memeriksa kemudian menghubungi pihak provider jika masalah tersebut tidak dapat ditangani sendiri. *Sitte Kipper* merupakan salah satu warga desa yang dipilih untuk menjaga BTS di desa tersebut”. (Selasa, 20 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

Berdasarkan hal tersebut tugas *Sitte Kipper* untuk menjaga dan memantau sistem kinerja dari suatu desa. *Sitte Kipper* merupakan warga desa tersebut yang dipilih dan ditunjuk oleh provider untuk menjaga BTS.

#### (10) Masyarakat

Masyarakat dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) berperan sebagai pengguna layanan. Tugas masyarakat adalah untuk memanfaatkan BTS (*Base Transceiver Station*) dengan tepat dan membuat suatu inovasi agar pemanfaatan BTS (*Base Transceiver Station*) dapat berjalan sesuai dengan rencana yaitu untuk membuka akses informasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Peran masyarakat di jelaskan oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informasi sebagai berikut :

“Masyarakat merupakan pengguna layanan dimana masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan BTS (*Base Transceiver Station*) secara efektif dan efisien untuk perkembangan pembangunan masyarakat tersebut” (Selasa, 20 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

#### 4.2.2 Faktor Mempengaruhi Penyediaan Akses Informasi Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya penyediaan Akses Informasi Masyarakat melalui BTS (*Base Transceiver Station*) tersebut. Oleh karena itu, agar lebih jelas berikut merupakan faktor yang menghambat dan mendorong penyediaan akses informasi melalui pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu :

##### a. Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam program penyediaan akses informasi melalui penyediaan Akses Informasi melalui jaringan

telekomunikasi dan informatika berupa BTS (*Base Transceiver Station*) sebagai berikut :

### 1. Teknologi

Penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi berupa *Base Transceiver Station* (BTS) di daerah perbatasan merupakan salah satu dampak adanya perkembangan teknologi dalam informasi dan komunikasi. Selain sebagai dampak dari pengembangan teknologi, pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan cara yang dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat agar mengenal teknologi. Daerah perbatasan yang tidak memiliki sinyal komunikasi atau *Blankspot Area* cenderung menjadi daerah yang tertinggal. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi dapat mendukung pengembangan kapasitas masyarakat agar terlepas dari ketertinggalan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan langkah yang di gunakan pemerintah untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, dengan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) diharapkan masyarakat daerah perbatasan dapat berkembang” (Selasa, 20 Februari 2018 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

Salah satu contoh pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan informatika yang telah di lakukan oleh Kabupaten Kapuas Hulu

adalah membuat web site. Pembuatan web site ini digunakan untuk memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu kepada orang luar. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi dapat mendukung proses peningkatan kapasitas masyarakat perbatasan. Pengembangan teknologi tersebut berupa penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika berupa tower mini *Base Transceiver Station* (BTS).

## 2. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap suatu pembangunan merupakan hal yang penting. Dukungan masyarakat akan pembangunan menjadi tolak ukur dari keberhasilan peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat merupakan objek dari pembangunan kapasitas tersebut. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan tersebut karena masyarakat menilai bahwa dengan adanya pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dapat memudahkan mereka dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Yohanes Kelen Sekreatasi Desa Lauk sebagai berikut :

“Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) memberikan kami harapan baru, dimana dengan adanya *Base Transceiver Station* (BTS) kami dapat berkomunikasi dengan mudah. Bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan mungkin komunikasi dan informasi bukanlah masalah namun bagi kami yang hidup di perbatasan dan *Blankspot Area* komunikasi dan informasi yang cukup lancar sudah kami idam-idamkan sejak lama” (Minggu, 18 Februari 2018, Kantor Desa Lauk)

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Yohanes Alon warga masyarakat Desa Sungai Uluk Palin sebagai berikut :

“Adanya pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di desa kami membuka akses informasi dan komunikasi. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) memberikan perubahan bagi kami. Saya secara pribadi bersyukur karena desa kami telah diberikan kesempatan untuk didirikan *Base Transceiver Station* (BTS)” (Minggu, 18 Februari, Desa Sungai Uluk Palin)

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dukungan masyarakat dapat mempengaruhi jalannya suatu pembangunan. Oleh karena itu, dukungan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan peningkatan kapasitas masyarakat perbatasan melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika.

### 3. Dukungan Pemerintah

Selain dukungan masyarakat, dukungan pemerintah juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Dukungan pemerintah secara penuh berupa membantu mempermudah pengurusan administrasi dalam pembangunan serta melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai pembangunan. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) mendapat dukungan yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“Pemerintah berlaku sangat supportif terhadap kegiatan pembangunan masyarakat. Kami dari dinas Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi berpegang teguh bahwa “Jika bisa di permudah



kenapa harus di persulit”. Hal itu yang menjadi pegangan kami dalam memberika pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS)” (Selasa, 20 Februari 2018 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Bustami Mantan Kepala Desa Lauk sebagai berikut :

“Pada masa pengajuan hingga terbangun BTS di desa kami, pemerintah bersifat sangat membantu dan mendukung. Sehingga, kami merasa sangat terbantu dan dimudahkan dengan adanya dukungan dari pemerintah” (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Lauk)

Berdasarkan hal tersebut pada pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu pemerintah mendukung secara penuh akan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.

#### b. Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam program penyediaan akses informasi melalui penyediaan Akses Informasi melalui jaringan telekomunikasi dan informatika berupa BTS (*Base Transceiver Station*) sebagai berikut :

##### 1. Kondisi Geografis

Terhambatnya penyediaan akses informasi disebabkan oleh kondisi Geografis. Dalam suatu pembangunan sarana infrastruktur tentunya harus memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah seperti struktur tanah, iklim, cuaca, transportasi, sarana jalan, jembatan, dan lain-lain. Faktor tersebut memberikan pengaruh pada kelancaran pembangunan akses informasi. Pada

pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) memperhatikan kondisi geografis, hal ini untuk menjamin kelancaran pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Zulkipli Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) sangat memperhatikan kondisi geografis lokasi yang akan dibangun. Oleh karena itu, sebelum ditetapkan menjadi lokasi yang akan dibangun pada tahap seleksi pihak BP3TI melakukan observasi lapangan. Hal ini bertujuan untuk melihat langsung lokasi yang akan dibangun beserta kondisi geografis lainnya (Selasa, 20 Februari 2018 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

Sejalan dengan hal tersebut bapak Yohanes Kelen Sekretaris Desa Lauk mengemukakan sebagai berikut :

“Sebelum desa Lauk dibangun BTS (*Base Transceiver Station*) ada beberapa pihak yang melakukan observasi terhadap lokasi yang desa kami ajukan, mereka juga mengobservasi akses jalan dan jembatan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan lancar. Kami selaku perwakilan warga desa berupaya mengikuti observasi kegiatan lapangan dari awal hingga akhir” (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Lauk)

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi geografis merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penyediaan akses informasi berupa BTS (*Base Transceiver Station*). Namun, dalam proses pembangunan akses informasi terdapat kendala yang berkaitan dengan kondisi geografis yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Alon sebagai berikut :

“kondisi lahan yang turun naik dan jauh dari pusat kota menyebabkan kesulitan pada proses pembangunan selain itu cuaca yang terkadang ekstrim menyebabkan gangguan pada

sinyal dari BTS (*Base Transceiver Station*)” (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Sungai Uluk Palin)

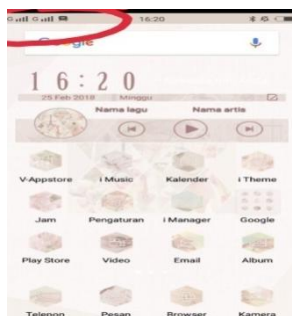
Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Bustami mantan kepala Desa Lauk sebagai berikut :

“Pada saat proses pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) terdapat kendala seperti keterbatasan peralatan. Namun, masalah tersebut dapat diatasi. Selain itu, cuaca dan musim karena ketika musim hujan tiba maka akan terjadi gangguan sinyal” (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Lauk)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan akses informasi berupa pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) bahwa kondisi geografis menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pembangunan sarana infrastruktur.

## 2. Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan Teknologi dalam pembangunan Akses Informasi masyarakat perbatasan adalah terbatasnya jangkauan dari BTS. Luas jangkauan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin yaitu 4-5 km<sup>2</sup> . Luas Wilayah Desa Lauk adalah 80.808 Ha sedangkan Luas Wilayah Desa Sungai Uluk Palin 2.808 Ha. Artinya tidak semua wilayah di kedua desa tersebut dapat terjangkau jaringan telekomunikasi yang di hasilkan oleh BTS (*Base Transceiver Station*). Selain luas jangkauan, kapasitas dari sinyal yang di hasilkan oleh BTS (*Base Transceiver Station*) pun menjadi hambatan dalam pemanfaatan BTS. Berikut merupakan hasil dokumentasi pada saat melakukan observasi di Desa Sungai Uluk Palin.



**Gambar 4.10** Sinyal di Desa Lauk

*Sumber : Dokumentasi Peneliti*

Pada desa Sungai Uluk Palin, sinyal yang dihasilkan adalah sinyal G atau GPRS. Sinyal G atau GPRS (*General Packet Radio Service*) memiliki kecepatan data mencapai 35-171 *Kilobits per-second*. Pada saat berada di lokasi tersebut peneliti mencoba untuk mengirim pesan singkat dan pesan tersebut dapat terkirim. Namun, pada saat peneliti mencoba untuk membuka internet maka hasilnya tidak dapat di proses. Artinya pada area ini hanya dapat ber kirim pesan singkat namun belum bisa mengakses internet. Hal tersebut di jelaskan oleh Pak Zuklipli Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

“pada saat ini di Kabupaten Kapuas Hulu tower BTS secara maksimal hanya mampu menghasilkan sinyal 2-G (Generasi 2). Sehingga untuk saat ini fungsi dari BTS (*Base Transceiver Station*) adalah untuk membuka akses komunikasi dan informasi masyarakat melalui telepon dan pesan singkat. Namun, peningkatan kapasitas sinyal yang di dihasilkan batas merupakan target kedepan. Sehingga pemanfaatan BTS (*Base Transceiver Station*) dapat menunjang program-program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Terutama program yang berkaitan dengan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. (Selasa, 20 Februari 2018 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Ibu Jumaisiah Helena warga desa Sungai Uluk Palin sebagai berikut :

“Sinyal yang dihasilkan dari BTS (*Base Transceiver Station*) cukup terbatas sehingga belum bisa mengakses internet. Padahal pada saat ini internet merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat, untuk mendukung pekerjaan dan lain-lain” (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Sungai Uluk Palin)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan teknologi berupa terbatasnya kapasitas dan jangkauan BTS (*Base Transceiver Station*). Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan jangkauan BTS (*Base Transceiver Station*) agar dapat memenuhi kebutuhan sinyal masyarakat untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih terbuka terhadap informasi dan komunikasi.

### 3. Inkompentensi Secara Teknologi

Selain memiliki sarana fisik, dalam pembangunan akses informasi masyarakat dituntut untuk mampu menguasai teknologi yang telah disediakan. Tersedianya fasilitas sarana infrastruktur tanpa di imbangi kemampuan manusia untuk memanfaatkan maka tidak akan memberikan hasil. Keberhasilan pembangunan akses informasi tidak hanya bergantung pada penggunaan alat atau teknologi tapi manusia sebagai pengguna. Sistem informasi yang tidak di sosialisasikan akan menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakan sistem informasi tersebut secara efektif dan efisien.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Nikolaus Yuser sebagai berikut :

“Baik dari pihak penyedia layanan maupun pemerintah belum melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan lanjutan dari pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*). (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Sungai Uluk Palin)

Hal sejalan juga disampaikan oleh Zulkapli mengenai sosialisasi pemanfaatan BTS (*Base Transceiver Station*) sebagai berikut :

“Pada awal pembangunan pemerintah hanya memberitakan bahwa akan ada program pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi berupa tower mini. Namun, sejak sudah terbangun belum ada sosialisasi mengenai pemanfaatan dan fungsi dari BTS (*Base Transceiver Station*) baik oleh pemerintah maupun pihak lain. (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Lauk)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa belum dilakukannya sosialisasi berkaitan dengan pemanfaatan atau fungsi dari BTS (*Base Transceiver Station*) baik dari pemerintah, kelompok masyarakat atau pihak provider sebagai penyedia layanan. Hal ini akan berdampak pada keberhasilan atau kegagalan dari program penyediaan akses informasi pada masyarakat. Penerapan sistem informasi harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna oleh karena itu perlunya arahan atau sosialisasi agar pemanfaatannya dapat tepat sasaran.

#### 4.2.3 Dampak Penyediaan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan

Tujuan utama pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika melalui pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) adalah untuk memberikan fasilitas kepada kawasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dalam bidang telekomunikasi dan informasi serta pengentasan kawasan susah sinyal atau *Blankspot Area*. Selain itu, tujuan dari pembangunan BTS adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam komunikasi dan informasi. Tujuan peningkatkan kapasitas masyarakat dalam komunikasi dan informasi adalah untuk melepaskan masyarakat dari ketertinggalan akibat rendahnya informasi di daerah mereka. Pembangunan BTS di latar belakang Nawacita Presiden sehingga yang menjadi fokus utama dalam pembangunan ini adalah masyarakat Desa yang berada di wilayah perbatasan.

Pada suatu pembangunan tentunya menimbulkan dampak, pada Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu sudah ada sejak tahun 2016 terdapat dampak positif dan negatif yang di sebabkan olehnya. Oleh karena itu, untuk melihat dampak pembangunan kapasitas masyarakat melalui penyediaan BTS berikut merupakan penjabaran dampak yang di hasilkan dari BTS pada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

## a. Dampak Positif

### 1. Terbukanya Akses Informasi

Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) berujuan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat 3T (terdepan, tertinggal dan terpecil) yang tinggal di perbatasan. Hal ini dijelaskan oleh Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

“Tujuan utama dari *Base Transceiver Station* (BTS) adalah membuka akses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat 3T yang ada di perbatasan. Pembangunan ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh layanan komunikasi dan informasi secara merata di seluruh Indonesia” (Rabu, 28 Desember 2016, Desa Kantuk Asam, Puring Kecana, pada acara Peresmian BTS)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) adalah untuk membuka akses informasi masyarakat daerah perbatasan. Berkaitan dengan tujuan dari pembanguna *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu membuka akses komunikasi dan informasi Bapak Zulkapli warga masyarakat Desa Lauk berpendapat sebagai berikut :

“Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di desa Lauk telah memberikan dampak perubahan bagi desa kami. Sebelum terbangunnya *Base Transceiver Station* (BTS) pada tahun 2016 untuk berkirin pesan singkat saja kami harus naik ke daerah perbukitan agar memperoleh sinyal. Namun, dengan adanya *Base Transceiver Station* (BTS) kami menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi” (Minggu, 18 Februari 2018, Desa Lauk)

Pernyataan tersebut di dukung oleh Bapak Yohanes Alon warga desa Sungai Uluk Palin sebagai berikut “

“Sebelum adanya *Base Transceiver Station* (BTS) di desa kami tidak dapat melakukan komunikasi jarak jauh menggunakan telepon



genggam. Sebelum adanya *Base Transceiver Station* (BTS) informasi yang masuk ke dalam desa kami cenderung lama. Contohnya saja pada saat berkirim pesan singkat ketika kita mengirim pesan singkat pada hari ini bisa saja pesan singkat tersebut baru terkirim pada hari berikutnya. Hal ini sangat menghambat proses komunikasi jarak jauh kami. Namun, setelah adanya jaringan telekomunikasi dan informatika *Base Transceiver Station* (BTS) kami menjadi jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi". (Minggu, 18 Desember 2018, Desa Sungai Uluk Palin)

Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) membuka akses informasi bagi masyarakat. Sehingga bagi desa yang sudah terbangun *Base Transceiver Station* (BTS) akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

## 2. Berkurangnya *Blankspot Area*

Dampak lain dari keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu adalah berkurangnya *Blankspot Area*. Berkurangnya *Blankspot Area* di tunjukan oleh data sebagai berikut.

**Tabel 4.5** Desa yang memiliki jaringan sinyal komunikasi dan informasi 2014

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	MEMILIKI JARINGAN SINYAL KOMUNIKASI DAN INFOMASI
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	12
2	BIKA	8	6
3	EMBALOH HILIR	9	2
4	EMBALOH HULU	10	4
5	BUNUT HILIR	11	3
6	BUNUT HULU	15	7
7	JONGKONG	14	6
8	HULU GURUNG	15	11
9	SELIMBAU	17	8
10	SEMITAU	12	4
11	SEBERUANG	15	9
12	BATANG LUPAR	10	5
13	EMPANANG	6	1
14	BADAU	9	1
15	SILAT HILIR	13	10
16	SILAT HULU	14	7
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	10
18	KALIS	17	9
19	BOYAN TANJUNG	16	7
20	MENTEBAH	8	3
21	PENKADAN	11	3
22	SUHAIID	11	5
23	PURING KENCANA	6	2
	TOTAL	282	135

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2014 terdapat 135 dari 282 desa memiliki sinyal Komunikasi dan Informatika. Artinya masih terdapat 147 desa yang belum memiliki sinyal atau daerah *Blankspot Area*. Sejak terbangunnya *Base Transceiver Station* (BTS) pada tahun 2016 dan 2017 telah terbangun 19 unit *Base Transceiver Station* (BTS) pada 19 desa. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan Aplikasi Informasi sebagai berikut :

“Pada tahun 2016 telah terbangun 11 unit *Base Transceiver Station* (BTS) pada 11 desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian

pada periode tahun 2017 terbangun 8 unit *Base Transceiver Station* (BTS) pada 8 desa. Sehingga jumlah *Blankspot Area* di Kabupaten berkurang menjadi 128 desa yang belum memiliki sinyal atau *Blankspot Area*” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak berdirinya *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 dan 2017 telah mengurangi jumlah *Blankspot Area*. Dimana dengan terbangunnya 19 unit *Base Transceiver Station* (BTS) membantu mengurangi jumlah *Blankspot Area* di Kabupaten Kapuas Hulu. Berkurangnya *Base Transceiver Station* (BTS) memberikan dampak pada pembangunan di Indonesia dimana dengan berkurangnya *Blankspot Area* menunjukkan bahwa telah terealisasikan agenda pembangunan nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu pembangunan sarana infrastruktur telekomunikasi bagi masyarakat perbatasan.

b. Dampak Negatif

1. Masyarakat Konsumtif

Pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika memberikan dampak yang baik pada pembangunan masyarakat di daerah perbatasan. Namun, dengan adanya pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) mengakibatkan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Jumaisiah sebagai berikut :

“dengan adanya *Base Transceiver Station* (BTS) masyarakat cenderung konsumtif, dimana sekarang masyarakat lebih sering membeli pulsa untuk berkomunikasi. Jika dibandingkan sebelumnya, masyarakat sangat jarang bahkan ada yang tidak pernah membeli pulsa karena dulu sama sekali belum dapat berkomunikasi didesa kami. Namun setelah terbangun *Base Transceiver Station* (BTS) masyarakat justru cenderung lebih konsumtif terhadap pembelian pulsa. (Minggu, 18 Desember 2018, Desa Sungai Uluk Palin)

Hal tersebut didukung oleh Pak Zulkipli Kepala Bagian Statistik dan

Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ,

sebagai berikut :

“Dalam pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) masyarakat tidak perlu memikirkan biaya apapun karena seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh pemerintah. Namun, untuk pembelian pulsa itu merupakan tanggungjawab dari pengguna” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) memberikan dampak negatif yaitu kebutuhan masyarakat menjadi bertambah. Hal ini justru menunjukkan kecenderungan konsumtif karena masyarakat akan lebih sering membeli pulsa agar dapat terus berkomunikasi. Namun, hal ini harus dibatasi sebelum masyarakat benar-benar menjadi konsumtif dan menjadikan pulsa sebagai kebutuhan pokok dalam pembiayaan hidup mereka. Oleh karena itu, sosialisasi diperlukan disini agar dapat membatasi masyarakat atau pengguna dalam pemanfaatan *Base Transceiver Station* (BTS) dan pembelian pulsa.

## 2. Penyalahgunaan Informasi

Berkembangnya teknologi informasi yang cepat masuk dalam kehidupan masyarakat. Sarana telekomunikasi dan informasi yang

tersedia, digunakan untuk mempermudah aktivitas hidup manusia. Namun, dibalik hal tersebut terdapat dampak negatif didalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Jumaisiah warga desa Sungai Uluk Palin sebagai berikut :

“saat ini marak terjadi kasus penipuan dan penyebaran berita *hoax* atau palsu melalui telepon genggam. Baik melalui pesan singkat dan melalui telepon.” (Minggu, 18 Desember 2018, Desa Sungai Uluk Palin)

Selain itu, hal serupa juga disampaikan oleh bapak Zulkipli kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika sebagai berikut :

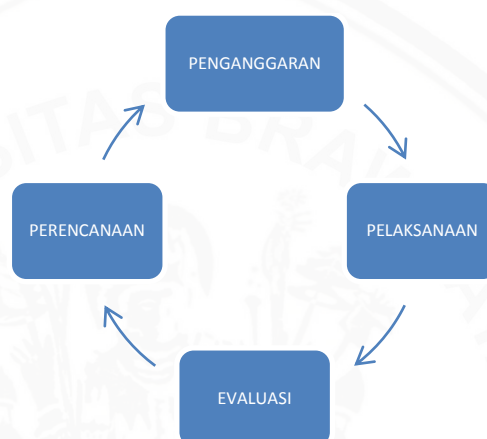
“Bahwa dengan adanya pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi tentunya juga menimbulkan resiko. Seperti terjadinya penyalahgunaan informasi seperti penipuan atau menyebarkan berita palsu. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap berhati-hati di dalam menerima informasi yang tersebar” (Rabu, 14 Februari 2018, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik).

Berdasarkan hal tersebut dampak lain dari pembangunan akses informasi adalah penyalahgunaan informasi. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuat himbauan di siaran televisi lokal milik dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Himbauan tersebut berisikan peringatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Pada proses perencanaan pembangunan terdapat beberapa tahapan dalam pembangunan. Adapun Siklus Perencanaan menurut Agus Suryono (2017) dapat di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.11** Siklus Perencanaan  
*Sumber : Agus Suryono (2017)*

Berikut merupakan hasil analisis terhadap siklus perencanaan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin.

- (1) Pada tahap perencanaan, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika menyusun perencanaan yang mengacu pada Nawacita Presiden 2014-2019 mengenai pembangunan dimulai dari pinggir. Mengacu pada hal tersebut Kementerian Telekomunikasi dan Informatika menyusun suatu program yaitu Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* atau yang di singkat KPU/USO. Dalam pelaksanaan Program Kewajiban Pelayanan

Universal, Menteri Telekomunikasi dan Informatika membentuk suatu kelompok khusus untuk bertanggungjawab. Kelompok khusus tersebut adalah BP3TI atau Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Melalui BP3TI ini proses perencanaan pun dimulai. Rencana pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di tujukan untuk wilayah yang tidak memiliki sinyal dan tidak memiliki fasilitas komunikasi di daerah perbatasan serta wilayah yang tergolong dalam kawasan 3T (terdepan,terluar, dan tertinggal). Oleh karena itu, BP3TI mengeluarkan beberapa persyaratan yang harus di lengkapi oleh desa yang ingin mengusulkan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*). Selain mengeluarkan persyaratan, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika menetapkan kriteriaan wilayah pelayanan Universal Telekomunikasi melalui Surat Keputusan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Nomor : 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi. Surat Keputusan tersebut menetapkan wilayah sebagai berikut; (1) bahwa wilayah yang belum memiliki sinyal, (2) wilayah yang belum tersedia layanan telekomunikasi.

- (2) Pada Proses penganggaran, pada pembangunanan BTS (*Base Transceiver Station*) proses penganggaran dilakukan oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Sumber pembiayaan

dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

- (3) Selanjutnya proses pelaksanaan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk dan Sungai Uluk Palin terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama dalam proses pelaksanaan adalah pengajuan atau pengusulan. Pada tahap pengajuan adalah tahap dimana suatu desa mengajukan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di desanya. Adapun beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh desa yang ingin mengajukan usulan pembangunan BTS berupa proposal dan beberapa surat pernyataan. Proposal dan Persyaratan tersebut di serahkan kepada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika yang kemudian akan di serahkan kepada BP3TI untuk di seleksi. Proses seleksi yang dilakukan oleh BP3TI yaitu melalui seleksi awal. Dimana BP3TI melakukan perbandingan data, yaitu data yang di sajikan oleh Desa tersebut dengan data yang bersumber daya Badan Pusat Statistik. Perbandingan ini bertujuan untuk menguji kebenaran data yang di tampilkan. Setelah melalui proses seleksi awal, desa yang sudah terpilih harus melalui tahap seleksi ke dua. Pada seleksi kedua ini akan diadakan observasi langsung. Observasi langsung dilakukan untuk melihat kondisi secara geografis untuk memastikan bahwa desa tersebut layak untuk di bangun BTS (*Base Transceiver Station*). Seleksi-seleksi ini dilakukan karena keterbatasan biaya sehingga pembangunan di



repository.ub.ac.id

lakukan per periode dan yang akan di prioritaskan adalah desa yang termasuk dalam kategori yang sudah dijabarkan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah tahap persetujuan dan pembangunan. setelah memperoleh daftar nama-nama desa yang akan dibangun maka proses pembangunan pun dimulai. Proses pembangunan diawali dengan pemesanan perangkat, estimasi waktu pemesanan yaitu selama satu tahun kemudian tahap pengerjaan yaitu selama kurang lebih satu bulan. Berikut merupakan gambar bangunan BTS (*Base Transceiver Station*) yang telah terbangun di Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin.

- (4) Terakhir adalah tahapan evaluasi. Pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin Belum terdapat hasil evaluasi.

#### 4.3.2 Faktor Mempengaruhi Penyediaan Akses Informasi Masyarakat

Pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) sebagai penyediaan akses informasi 3T (terdepan, terluar dan terpencil) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor mempengaruhi tersebut terbagi menjadi dua yaitu :

a. Pendukung

Proses pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) tentunya terdapat faktor pendukung. Adapun faktor pendukung dalam program peningkatkan kapasitas masyarakat melalui

UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA

penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika berupa BTS (*Base Transceiver Station*) sebagai berikut :

1. Teknologi

Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) pada *Blankspot Area* di daerah perbatasan merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi. Walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan namun dengan adanya penyediaan BTS (*Base Transceiver Station*) di wilayah perbatasan telah memberikan dampak yang cukup besar untuk pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan cara pemerintah untuk membuka akses informasi masyarakat. BTS (*Base Transceiver Station*) digunakan untuk membuka akses informasi masyarakat karena dinilai efektif, dimana BTS (*Base Transceiver Station*) akan dipasang pada setiap daerah yang tidak memiliki sinyal. Pembangunan tower mini ini tidak dilakukan pada semua desa, namun pembangunannya menyebar. Penyebaran pembangunan ini bertujuan untuk memperluas jaringan, sehingga dengan tersebarnya bangunan BTS (*Base Transceiver Station*) ini maka jaringan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya *blankspot area* dapat terjangkau.

Selain membuka akses informasi, pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) bertujuan sebagai “pancingan”. Artinya dengan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah membuat suatu strategi perencanaan yaitu dengan membuat ”pancingan”. Pancingan ini bertujuan untuk menunjukkan tinggi rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap sinyal telekomunikasi dan informasi. Hasil ini akan digunakan untuk memperlihatkan kepada pihak *private* tinggi rendahnya minat masyarakat terhadap komunikasi dan informasi. Sehingga dapat membangun tower yang lebih besar atau dengan teknologi yang lebih berkembang agar mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

## 2. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat dalam suatu pembangunan merupakan langkah awal yang harus dimiliki dalam pembangunan. pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) masyarakat berperan tidak hanya sebagai pengguna namun juga berpartisipasi aktif untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan sinyal yang dihasilkan BTS (*Base Transceiver Station*). Masyarakat desa Lauk dan desa Sungai Uluk Palin berdasarkan hasil wawancara memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi di desa mereka. Dukungan yang

dilakukan masyarakat adalah dengan memberikan lahan milik desa untuk dihibahkan dan dibangun BTS (*Base Transceiver Station*).

Dukungan masyarakat yang tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu juga terlihat dengan keinginan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan terhadap fasilitas tersebut. Namun sehingga saat ini belum terdapat kegiatan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan BTS (*Base Transceiver Station*). Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk diberdayakan dan dibentuk kelompok inovasi. Hal ini agar pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu.

### 3. Dukungan Pemerintah

Pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) tidak dapat berjalan tanpa bantuan dari pemerintah. Adapun bentuk dukungan pemerintah dalam melakukan pembangunan akses informasi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

#### 1) Membuat perencanaan

Pembangunan akses informasi untuk masyarakat perbatasan bukan merupakan suatu proses yang singkat. Berawal dari proses perencanaan baik perencanaan dalam pembangunan, penganggaran dan berbagai proses

perencanaan lainnya. Dimana dalam proses perencanaan tersebut pemerintah yang bertanggungjawab untuk merancang suatu perencanaan pembangunan yang baik sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh Masyarakat secara keseluruhan.

Peran pemerintah dalam proses perencanaan merupakan peranan yang sangat penting. Pada proses pembangunan jika tanpa proses perencanaan yang baik akan memberikan hasil juga.

## 2) Melaksanakan perencanaan

Setelah melakukan perencanaan, maka pemerintah harus mampu untuk melaksanakan perencanaan tersebut dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu pemerintah melalui BP3TI membantu dalam mengawasi pembangunan dari awal hingga akhir.

## 3) Melakukan Koordinasi

Pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memegang peranan penting dalam melakukan koordinasi dan fasilitator. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengkoordinator desa-desa yang ingin mengajukan desanya untuk dibangun BTS (*Base*

*Transceiver Station*). Selain itu, dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik juga memfasilitasi seluruh kegiatan pengajuan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu

## b. Penghambat

### 1. Kondisi Geografi

Kondisi geografis berpengaruh pada proses pembangunan fisik BTS (*Base Transceiver Station*) sehingga hal ini dikategorikan sebagai salah satu indikator yang menghambat pembangunan akses informasi. Pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) hal yang harus diperhatikan adalah struktur tanah dan lahan, curah hujan, cuaca, iklim, akses jalan dan jembatan serta transportasi.

Pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi kendala geografis yaitu struktur tanah yang turun naik atau bergelombang. Hal inilah mempersulit dalam melakukan pembangunan, karena tidak semua desa memiliki struktur tanah yang tinggi. pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) harus dilakukan di lahan yang tinggi agar terhindar dari genangan air saat banjir. Oleh karena itu, lokasi pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) harus merupakan tempat yang tinggi dan memiliki struktur tanah yang

kuat. Selain itu, cuaca dan iklim juga menjadi faktor penghambat dalam pembangunan akses informasi masyarakat berbatasan. Dimana pada saat musim hujan tiba maka sinyal yang dihasilkan oleh BTS (*Base Transceiver Station*) akan melemah karena terjadinya gangguan.

## 2. Keterbatasan Teknologi

Terbatasnya jangkauan dan kapasitas BTS merupakan bentuk dari Keterbatasan Teknologi di Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin yaitu 4-5 km<sup>2</sup>. Selain luas jangkauan, kapasitas dari sinyal yang di hasilkan oleh BTS (*Base Transceiver Station*) pun menjadi hambatan dalam pemanfaatan BTS. Berikut merupakan hasil dokumentasi pada saat melakukan observasi di Desa Sungai Uluk Palin. Pada desa Sungai Uluk Palin, sinyal yang dihasilkan adalah sinyal G atau GPRS. Sinyal G atau GPRS (*General Packet Radio Service*) memiliki kecepatan data mencapai 35-171 *Kilobits per-second*. Pada saat berada di lokasi tersebut peneliti mencoba untuk mengirim pesan singkat dan pesan tersebut dapat terkirim. Namun, pada saat peneliti mencoba untuk membuka internet maka hasilnya tidak dapat di proses. Artinya pada area ini hanya dapat berkirim pesan singkat namun belum bisa mengakses internet. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan jangkauan BTS (*Base Transceiver Station*) agar dapat

memenuhi kebutuhan sinyal masyarakat untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih terbuka terhadap informasi dan komunikasi.

### 3. Inkompetensi Secara Teknologi

Inkompetensi secara teknologi merupakan kondisi dimana masyarakat tidak menguasai fasilitas teknologi yang telah disediakan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi atau bahkan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan arahan kepada masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas yang diberikan.

Pada pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi terhadap pemanfaatan atau fungsi dari BTS (*Base Transceiver Station*). Hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak tahu pasti bagaimana cara memanfaatkan fasilitas akses informasi tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dibentuk kelompok masyarakat agar kemudian dapat diberikan sosialisasi berkaitan dengan pemanfaatan BTS (*Base Transceiver Station*).



#### 4.3.3 Dampak Penyediaan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan

Pembangunan Akses Informasi melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi berupa *Base Transceiver Station* (BTS) adalah untuk memberikan fasilitas kepada kawasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dalam bidang telekomunikasi dan informasi serta pengentasan kawasan susah sinyal atau *Blankspot Area*. Pembangunan BTS di latar belakang Nawacita Presiden sehingga yang menjadi fokus utama dalam pembangunan ini adalah masyarakat Desa yang berada di wilayah perbatasan. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu sudah ada sejak tahun 2016. Oleh karena itu, untuk melihat dampak pembangunan kapasitas masyarakat melalui penyediaan BTS berikut merupakan penjabaran dampak yang di hasilkan dari BTS pada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut :

##### a. Dampak Positif

###### 1. Terbukanya Akses Informasi

Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) berujuan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat 3T (terdepan, tertinggal dan terpececil) yang tinggal di perbatasan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) adalah untuk membuka akses informasi masyarakat daerah perbatasan. Pembukaan akses informasi masyarakat dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan sektor perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya.

Keterbukaan akses informasi di Kabupaten Kapuas Hulu telah membuka akses informasi untuk masyarakat. Sehingga melalui pembangunan akses informasi tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi terbaru. Namun, hal tersebut justru memberikan dampak lainnya yaitu masyarakat menjadi lebih susah dikontrol dalam mengakses informasi. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan baru seperti tindak kriminal. Oleh karena itu, dalam pembukaan akses informasi ini pemerintah juga harus mampu mengarahkan masyarakat agar menggunakan sarana informasi dan komunikasi lebih bijak lagi sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan teknologi.

## 2. Berkurangnya *Blankspot Area*

Dampak lain dari keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Kapuas Hulu adalah berkurangnya *Blankspot Area*. Pada tahun 2014 terdapat 147 desa yang belum memiliki akses informasi. Namun, sejak terbangunnya *Base Transceiver Station* (BTS) pada tahun 2016-2017 jumlah desa yang tidak memiliki akses informasi menjadi 118. Dampak pengurangan daerah yang tidak memiliki sinyal ini membuka kesempatan masyarakat. Berkurangnya *Blankspot Area* di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan keberhasilan dari program pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi. Berkurangnya *Blankspot*

*Area* telah berhasil membuat masyarakat perbatasan menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar.

c. Dampak Negatif

1. Masyarakat Konsumtif

Dampak pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) pada masyarakat perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu tidak hanya dapat memberikan dampak positif. Namun terdapat pula dampak negatif yang di akibatkan dalam pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) tersebut. Akses informasi yang sudah terbuka di daerah perbatasan menyebabkan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Hal ini dikarenakan masyarakat masing-masing memiliki biaya tambahan untuk membeli pulsa. Jika dibandingkan pada saat dulu sebelum adanya BTS (*Base Transceiver Station*) masyarakat tidak perlu membeli pulsa karena di desa mereka tidak dapat melakukan komunikasi melalui telepon genggam. Namun, setelah adanya pembukaan akses informasi melalui BTS (*Base Transceiver Station*) masyarakat cenderung lebih bergantung pada telepon genggam dan untuk itu mereka membutuhkan pulsa.

Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan arahan agar dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan efektif dan efisien agar biaya yang mereka keluarkan berupa pulsa dapat memberikan keuntungan atau paling tidak memberikan manfaat lain terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Hal inilah yang

menunjukkan bahwa perlu diadakannya sosialisasi berkaitan dengan pemanfaatan BTS (*Base Transceiver Station*) kepada masyarakat, sehingga dengan adanya sosialisasi akan mengurangi sifat konsumtif masyarakat kemudian berubah menjadi lebih produktif.

## 2. Penyalahgunaan Informasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Informasi yang tersampaikan dengan cepat dimana setiap individu dapat dengan mudah untuk membuat informasi dan dengan cepat menyebarkan informasi tersebut. Hal ini yang menyebabkan munculnya *Hoax* atau berita palsu dimana bisa saja ini merupakan usaha dari penipuan yang dapat merugikan orang lain.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk berhati-hati terhadap penipuan, kriminalitas, dan penyebaran berita *Hoax* melalui telepon genggam. Himbauan tersebut dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan membuat iklan di siaran televisi Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pembangunan akses informasi melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan infomatika berupa pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin bahwa dalam penyediaan BTS (*Base Transceiver Station*) telah sesuai dengan siklus perencanaan. Berkaitan dengan kinerja BTS (*Base Transceiver Station*) dapat dikatakan berhasil dalam membuka akses informasi dan mengurangi *Blankspot Area*. Namun, perlu dilakukan peningkatan luas jangkauan dan kualitas dari sinyal yang di hasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sinyal masyarakat secara menyeluruh.

Proses peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk dan Desa Sungai Uluk Palin sudah memberikan dampak terhadap terbukanya akses informasi dan berkurangnya *Blankspot Area*. Pada proses peningkatan kapasitas masyarakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyediaan akses informasi masyarakat perbatasan. Adapun faktor tersebut adalah faktor pendukung dan penghambat dalam penyediaan akses informasi. Faktor pendukung dalam penyediaan akses informasi masyarakat perbatasan adalah teknologi, Dukungan

Masyarakat dan Dukungan Pemerintah. Kemudian Faktor yang menghambat penyediaan akses informasi yaitu Kondisi Geografis, Keterbatasan Teknologi, dan Imkompensi secara teknologi. Selanjutnya adapun dampak dari pembangunan akses informasi masyarakat perbatasan dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif. Adapun dampak Positifnya adalah terbukanya akses informasi masyarakat sehingga masyarakat perbatasan dapat memperoleh akses informasi dan berkomunikasi dengan mudah serta berkurangnya *Blankspot Area*. Sedangkan dampak negatif yaitu adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan informasi dan masyarakat cenderung menjadi lebih konsumtif.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah yaitu pertama membentuk kelompok masyarakat, kemudian melakukan sosialisasi dan terakhir adalah menggerakkan masyarakat dengan program kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BTS (*Base Transceiver Station*). Selanjutnya adalah melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat lebih terarah dan terhindar dari dampak negatif. Sehingga pembangunan akses informasi masyarakat perbatasan melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika dapat berjalan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien

## 5.2 Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang telah di paparkan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan keberhasilan peningkatan

kapasitas masyarakat perbatasan melalui penyediaan jaringan telekomunikasi dan informasi berupa BTS (*Base Transceiver Station*). Saran tersebut antara lain :

1. Membentuk Kelompok Inovasi Masyarakat di setiap desa yang telah terbangun BTS (*Base Transceiver Station*). Kelompok inovasi masyarakat ini adalah untuk mengumpulkan ide-ide kreatif masyarakat yang dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat itu sendiri baik dalam aspek ekonomi maupun sosial dengan pemanfaatan fasilitas yang telah di sediakan.
2. Pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk memperoleh dana pembangunan. Kerjasama tersebut dilakukan untuk memperluas pembangunan kapasitas masyarakat dengan memanfaatkan BTS (*Base Transceiver Station*).
3. Masyarakat bersama perangkat desa membuat rencana kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BTS (*Base Transceiver Station*). Sehingga melalui rencana kegiatan baru ini desa tersebut dapat memperoleh anggaran baru kemudian dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas dari BTS (*Base Transceiver Station*). Rencana kegiatan ini mungkin dapat menggunakan dana desa. Dengan demikian maka penyediaan BTS (*Base Transceiver Station*) di Desa Lauk, Desa Sungai Uluk Palin dan seluruh desa dapat termanfaatkan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul dan Oetojo (2004). *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah SIMDA*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Arsyad, Linkolin. (1999). *Pengantar dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE
- Caiden, Gerald (1982). *Public Administration*. California : Palisades Publishers.
- Caldow, Janet (2001). *Institute for Electronic Government*. UK : IBM Corporation
- Dimock, D. &. (1992). *Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimock, K. (1960). *Public Administration*. New York: Rineart & Company.
- Effendy, Onong Uchjan (1993). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Haryono, B. S. (2012). *Capacity Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hasniati. (2006). *Kebijakan Pengembangan Elektronik Government : Sebuah Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah* Visi Jurnal Ilmu Administrasi, Fisip Universitas Hasanudin, Vol. VII, No2, September 2006, Hal 30-40
- Herdiansyah, Haris. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Grups sebagai instrumen penggalan Data Kualitatif*. Cetakan ke 2. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Indrajid, Richardus Eko. (2006). *Elektronik Government - Statrategi Pembangunan dan pembangunan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Cetakan ke tiga. Yogyakarta : Andi Offset
- Kumorotomo, Wahyudi Margono & Subando Agus.(1994). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Universitas Gajahmada
- Kumorotomo, Wahyudi Margono & Subando Agus.(2004). *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta : Universitas Gajahmada
- Milles, Matthew B, A Michael Huberman and Joeny Saldana. (2014). *Kualitatif Data Analisis A Methode Sourcebook Third Edition*. Arizona State University : Los Angeles
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya



- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan tiga puluh dua Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, Zulkarnaen (2001). *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Portes, Alenjandro (1976). *On the sociology of national development : Theories and Issue*. American Journal of Sociology 82: 68-74
- Said, A. (2012). *Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Siagian, P Sondang (1994). *Filsafat Administrasi*. Cetakan ke dua puluh dua. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Siagian, P Sondang (2000). *Manajemen Abad 21*. Jakarta Bumi Aksara
- Soekamto, Soerjono (2013). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soeprapto, Tommy. 2006. *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta : Media Presindo
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta
- Sutanta, Edhy (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suryono, A. (2001). *Teori dan Isu - Isu Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Suryono, A. (2004). *Pengantar Teori Pembangunan (Edisi 1)*. Malang: UM Press.
- Suryono, A. (2017). *Perencanaan Pembangunan Ekonomi*. Malang : UB
- Sutabri, Tata (2005). *Sistem Informasi Manajemen, Edisi 1*. Yogyakarta : Andi
- Syafiie, Tanjung, Moedang (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Thoha. Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta Kencana
- Tjokroaminoto, B. (1987). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Waldo, D. (1971). *Pengantar Studi Public Administration*. Terjemahan Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Radar Jaya Offset

**Sumber Hukum :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 2017. *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka*. Katalog : BPS

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. *Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik*

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika*

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. *Kondisi Masyarakat Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu*.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Rekapitulasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu 2017

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Data Pokok dan Potensi Desa Sungai Uluk Palin.2017

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Data Pokok dan Potensi Desa Lauk.2017

Nawacita Presiden 2014-2019

Peraturan Menteri Komunkasi dan Informatika No 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi

Undang-undang 1945 pasal 28F tentang Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Komunikasi

Undang- undang nomor 43 tahun 2008 tentang Daerah perbatasan

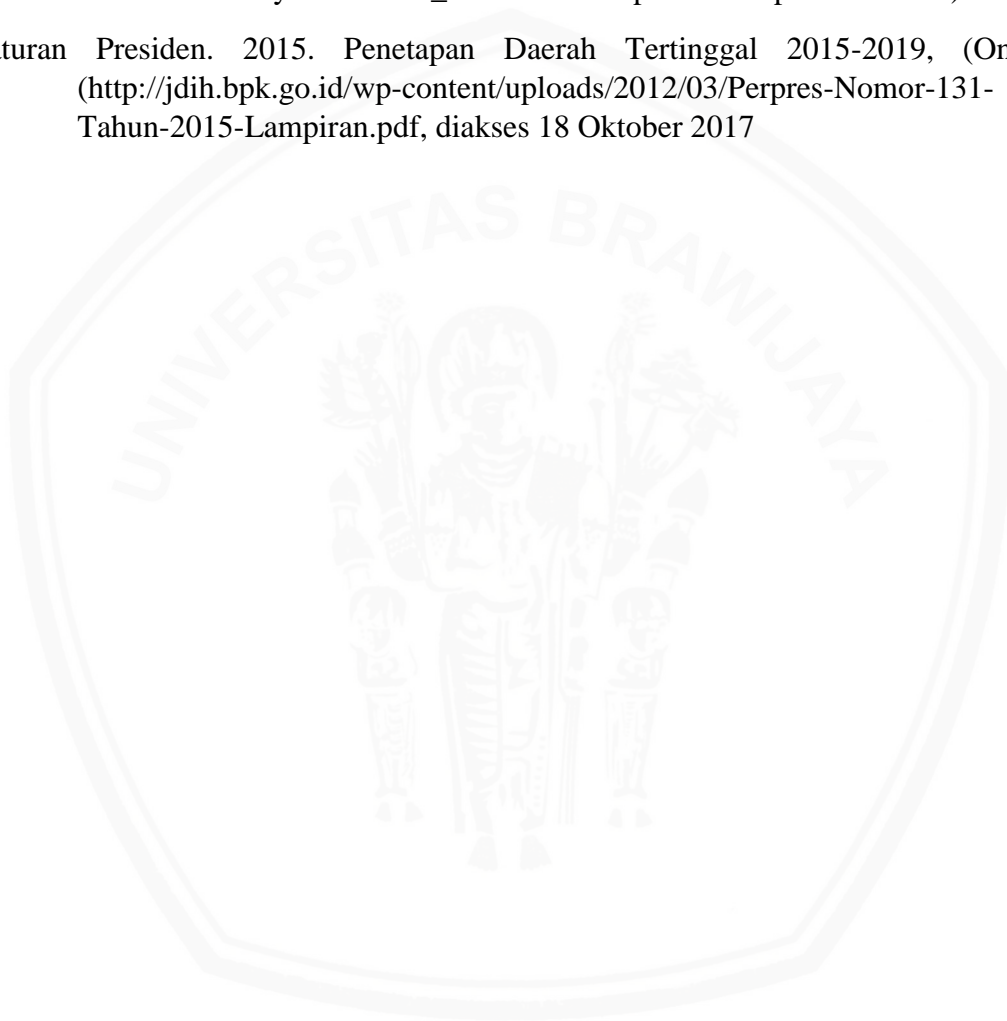
**Sumber Lainnya :**

Badan pusat statistik.2017. *Persentase Kemiskinan Indonesia periode 2016-2017* (Online), (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366> diakses, 18 Oktober 2017)

Deddy T. Tikson.2005. *Dalam Konteks Pembangunan Sebagai Transformasi Ekonomi*. (Online). ([Http://ilearn.Unand.ac.id.blog , indeks.php.entryid](http://ilearn.Unand.ac.id/blog_indeks.php.entryid). diakses pada 13 September 2017)

Fitria, Jauhari. Resmikan Tower BTS di Kapuas Hulu Rudiantara : Sebagai Upaya Membangun Infrastruktur Telekomunikasi. (Online).(<https://www.kalbaronline.com/resmikan-tower-bts-di-kapuas-hulu-rudiantara-sebagai-upaya-membangun-infrastruktur-telekomunikasi/> diakses pada 14 September 2017)

- Hakim, Sahirul. 2016. Menkominfo Resmikan BTS Desa Kantuk Asam Kapuas Hulu.(Online). (<http://pontianak.tribunnews.com/2016/12/28/menkominfo-resmikan-bts-desa-kantuk-asam-kapuas-hulu> diakses pada 17 September 2017)
- Kementarian Telekomunikasi dan Informatika. 2016. Telepon Pertama, Menkominfo-Bupati Kapuas Hulu, Manfaatkan BTS Perbatasan Indonesia-Malaysia. (Online).(https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/8583/telepon-pertama-menkominfo-bupati-kapuas-hulu-kalbar-manfaatkan-bts-perbatasan-indonesia-malaysia/0/berita\_satker diakses pada 17 September 2017)
- Peraturan Presiden. 2015. Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019, (Online), (<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Perpres-Nomor-131-Tahun-2015-Lampiran.pdf>, diakses 18 Oktober 2017)



**NAWACITA  
JOKO WIDODO - JUSUF KALLA  
2014 - 2019**

- 1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA**
- 2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA**
- 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN**
- 4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA**
- 5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA**
- 6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL**
- 7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK**
- 8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA**
- 9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA**

## LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

RUMUSAN MASALAH	FOKUS	PERTANYAAN	DATA SEKUNDER	OBSERVASI	DOKUMENTASI
1. Bagaimana Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika sebagai upaya pembangunan Kapasitas Masyarakat Perbatasan di Kapuas Hulu ?	1. Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika sebagai Upaya pembangunan Kapasitas Masyarakat Perbatasan	1. Bagaimana Tahapan perencanaan penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika ?	1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 14 Februari 2018	
		2. Bagaimana Tahapan Penganggaran penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika ?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 14 Februari 2018	
		3. Bagaimana Tahapan Pelaksanaan penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 14 Februari 2018 2. Desa Lauk pada 18 Februari 2018 3. Desa Sungai Uluk Palin 2018	Gambar 4.6 Gambar 4.7 Gambar 4.8 Gambar 4.9 Tabel 4.2
	2. Penyediaan Sumber Daya	1. Bagaimana penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Kapuas Hulu ?	1. Rekapitulasi Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika 2. Rekapitulasi Sinyal Telepon Kabupaten Kapuas Hulu 2017	1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 20 Februari 2018	

		2. Bagaimana penyediaan sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dalam pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 20 Februari 2018	
	3. Peran Stakeholder	1. Bagaimana peran pemerintah dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 14 Februari 2018 2. Desa Lauk pada 18 Februari 2018 3. Desa Sungai Uluk Palin 18 Februari 2018	
		1. Bagaimana peran swasta dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 14 Februari 2018	
		1. Bagaimana peran masyarakat dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 14 Februari 2018 2. Desa Lauk pada 18 Februari 2018 3. Desa Sungai Uluk Palin 18 Februari 2018	

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika sebagai upaya pembangunan kapasitas masyarakat perbatasan di Kapuas Hulu ?	1. Faktor Penghambat	1. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 14 Februari 2018 2. Desa Lauk pada 18 Februari 2018 3. Desa Sungai Uluk Palin 18 Februari 2018	Gambar 4.10
	2. Faktor Pendukung	2. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 14 Februari 2018 2. Desa Lauk pada 18 Februari 2018 3. Desa Sungai Uluk Palin 18 Februari 2018	
3. Bagaimana dampak penyediaan jaringan telekomunikasi	1. Akses Informasi Masyarakat	1. Bagaimana dampak pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi terhadap ketersediaan akses informasi masyarakat ?		1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 20 Februari 2018 2. Desa Lauk pada 18 Februari 2018 3. Desa Sungai Uluk Palin 18 Februari 2018	


dan informatika pada masyarakat perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu ?	2. Pengurangan <i>Blankspot Area</i>	2. Bagaimana tingkat persebaran <i>Blankspot Area</i> setelah dibangunnya <i>BTS (Base transceiver station)</i> ?	1. Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada 20 Februari 2018 2. Desa Lauk pada 18 Februari 2018 3. Desa Sungai Uluk Palin 18 Februari 2018	
---	--------------------------------------	---	---	--





### LAMPIRAN 3. BIODATA NARASUMBER

**BIODATA NARASUMBER**

1. Nama Lengkap	: Zulkipri S.H., M.A.P.	
2. Nama Panggil	: Zul	
3. Tempat/ Tanggal Lahir	: Tj. Entabab, 18 September 1982	
4. Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan	
5. Alamat	: Putussibau	
6. Pangkat/ Golongan	: PENYATA / III.C	
7. Jabatan	: Kepala Bidang Statistik Aplikasi Informatika	
8. NIP	: 19820918 200902 1001	
9. Instansi	: Kominfo dan Statistik	
10. Alamat Instansi	: Kapuas Hulu / Putussibau	
Kecamatan	: Putussibau Utara	
Kabupaten/ Kota	: Kapuas Hulu	
Provinsi	: Kalbar	
11. Nomor Telpon Rumah/HP	: 085248542828	
12. Email	: zulkipriachmad32@gmail.com	



BIODATA NARASUMBER

1. Nama Lengkap : SUTIK, S.I.  
 2. Nama Panggil : SUTIK  
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : DEMAK, 3 DESEMBER 1982  
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
 5. Alamat : JL. M. BANTAR PUTUSSIBAU  
 6. Pangkat/ Golongan : PENATA MUDA TK. I / III b  
 7. Jabatan : KASI STATISTIK  
 8. NIP : 19821203 201001 1 017  
 9. Instansi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
 10. Alamat Instansi : JL. ANTASARI NO. 8 PUTUSSIBAU  
 Kecamatan : PUTUSSIBAU UTARA  
 Kabupaten/ Kota : KABUPATEN HULU  
 Provinsi : KALIMANTAN BARAT  
 11. Nomor Telpn Rumah/HP : 08122788064  
 12. Email : kicx.production@gmail.com



BIODATA NARASUMBER

1. Nama Lengkap : MOHAMMAD JAMIN  
 2. Nama Panggil : YAMIN  
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : PONTIANAK, 3 JUNI 1968  
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
 5. Alamat : JL. LINDAS SELATAN  
 KEDAMIN HULU Gg. Famili 18  
 6. Pangkat/ Golongan : PENATA / III c  
 7. Jabatan : KASI APLIKASI INFORMATIKA  
 8. NIP : 19680603 199102 1004  
 9. Instansi : DISKOMINFO DAN STATISTIK  
 10. Alamat Instansi : JL. ANTASARI NO. 8  
 Kecamatan : PUTUSSIBAU UTARA  
 Kabupaten/ Kota : KABUPATEN HULU  
 Provinsi : KALBAR  
 11. Nomor Telpn Rumah/HP : 085251691701  
 12. Email : m.yamin.0306@gmail.com



BIODATA NARASUMBER

1. Nama Lengkap : YOHANES KELEN
2. Nama Panggil : KELEN
3. Tempat/ Tanggal Lahir : ULAK - PAUF, 9 November 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
5. Alamat : Rt 001 / Rw 001 Dusun LAUF HULU  
Desa LAUF Kec. Puteussibau Utara
6. Pangkat/ Golongan : .....
7. Jabatan : .....
8. NIP : .....
9. Instansi : Pemerintah Desa LAUF
10. Alamat Instansi : Jln Lintas Utara Km 57  
Kecamatan : Puteussibau Utara.  
Kabupaten/ Kota : Kapuas Hulu.  
Provinsi : Kalimantan Barat.
11. Nomor Telpn Rumah/HP : 0812-5468-9129
12. Email : .....



Lampiran

BIODATA NARASUMBER

1. Nama Lengkap : JOHANNES HULIN
2. Nama Panggil : HULIN
3. Tempat/ Tanggal Lahir : SELUHAN, 1 SEPTEMBER 1960
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
5. Alamat : JLN PATINGSI SARI GG. NYUAI  
DESA PALA PULAU.
6. Pangkat/ Golongan : PENATA Tk 2 / III 2.
7. Jabatan : KASI ERBANS.
8. NIP : 196009011986031018
9. Instansi : KANTOR CAMAT PUTEUSSIBAU UTARA
10. Alamat Instansi : JLN. LINTAS UTARA NO 2. PUTEUSSIBAU.  
Kecamatan : PUTEUSSIBAU UTARA  
Kabupaten/ Kota : KAPUAS HULU  
Provinsi : KALIMANTAN BARAT
11. Nomor Telpn Rumah/HP : 085650200491
12. Email : .....



Lampiran

BIODATA NARASUMBER

1. Nama Lengkap : *Jumaisyah Herlina, AM*
2. Nama Panggil : *Jum*
3. Tempat/ Tanggal Lahir : *17 Agustus 1969*
4. Jenis Kelamin : *Laki laki / Perempuan*
5. Alamat : *Resa Sungai uluk Palim*
6. Pekerjaan : *Siswa*
7. Nomor Telpon Rumah/HP : *08525098001*
8. Email : .....



Lampiran

BIODATA NARASUMBER

1. Nama Lengkap : *Nikolaus Yusep*
2. Nama Panggil : *Yusep*
3. Tempat/ Tanggal Lahir : *Sei uluk palim, 12-12-1977*
4. Jenis Kelamin : *Laki-laki / Perempuan*
5. Alamat : *Dusun Tanjung Kerja*
6. Pekerjaan : *Kasi KESRA*
7. Nomor Telpon Rumah/HP : *0822 5777 5875*
8. Email : .....



Lampiran

BIODATA NARASUMBER

- 1. Nama Lengkap : TOHANES ALON
- 2. Nama Panggil : ALON
- 3. Tempat/ Tanggal Lahir : MENGKATANG, 20-12-1978
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- 5. Alamat : Dusun Sei uluk palin  
PS-Sanga uluk palin
- 6. Pekerjaan : SWASTA / Kasi PEMERINTAHAN
- 7. Nomor Telpon Rumah/HP : 0852 5203 1659.
- 8. Email : .....



Lampiran

BIODATA NARASUMBER

- 1. Nama Lengkap : Bp. BUSTAMI
- 2. Nama Panggil : BUSTAMI
- 3. Tempat/ Tanggal Lahir : SAMBAS. 11. NOV. 1974.
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- 5. Alamat : JLN LINTAS UTARA  
DESA LAUK KM. 57.
- 6. Pekerjaan : MANTAN KADES LAUK.
- 7. Nomor Telpon Rumah/HP : 0853 4501 0826.
- 8. Email : .....



### BIODATA NARASUMBER

- 1. Nama Lengkap : Julkapi
- 2. Nama Panggil : Jul
- 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Lauk, 20-2-1999
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- 5. Alamat : Desa Lauk
- 6. Pekerjaan : Swasta
- 7. Nomor Telpn Rumah/HP : 0812564676
- 8. Email :



LAMPIRAN 4 SURAT PENGANTAR IZIN RISET



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 18712 /UN10.F03.11.11/PN /2017  
Lampiran : -  
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Kapuas Hulu  
Jl. Antasari No.08 Putussibau

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Kornelia Bernadecta Lie  
Alamat : Jl. Andong Selatan No.3 RT 06 RW 02 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65141  
NIM : 145030601111001  
Program Studi : Administrasi Publik  
Konsentrasi/Minat : Perencanaan Pembangunan  
Tema : Pembangunan Kapasitas Masyarakat Perbatasan Melalui Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu)  
Lamanya : 3 (tiga) bulan  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 19 Desember 2017

Mengetahui,  
Kepala Jurusan Administrasi Publik  
  
**Des. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D**  
NIP. 196702171991031000

M : 08



LAMPIRAN 5 REKOMENDASI PENELITIAN DARI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 21 Desember 2017

Nomor : 070/ 15077 / 209.4/ 2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
Yth Gubernur Kalimantan Barat  
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik  
di PONTIANAK

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  
Nomor : 18772/UN10.F03.11.11/PN/2017  
Tanggal : 19 Desember 2017

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Kornelia Bernadecta Lie  
A l a m a t : Jl. Pendidikan Gg SUI Kualii No. 7 Putussibau, Kapuas Hulu  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Pembangunan Kapasitas Masyarakat Perbatasan melalui Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu)"  
Tujuan/bidang : Permintaan data, skripsi / Telekomunikasi & Informatika  
Dosen Pembimbing : Niken Lastiti V.A., SAP.,MAP dan Rendra Ekowismanu, S.AP., M.AP  
Peserta : -  
Waktu : 3 bulan  
Lokasi : Provinsi Kalimantan Barat

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik

Kasub Bidang Demokrasi dan HAM




NIP. 19630315 198503 1 014

**Tembusan :**

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di Malang ;  
2. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN 6 REKOMENDASI PENELITIAN DARI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Nusa Antasari Nomor 02 Telp. (0567) 21003  
Fax. (0567) 21379  
**PUTUSSIBAU 78711**

Putussibau, 4 Januari 2018

Nomor : 070.2/ 03 /Setda/KB-A  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey**

Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;  
2. Camat Putussibau Utara  
3. Kepala Desa Lauk Kec. Putussibau Utara  
4. Kepala Desa Uluk Palin Kec. Putussibau Utara


di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Malang Nomor : 18772/UN10.F03.11/PN/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Survey/Riset, diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Bupati Kapuas Hulu tidak berkeberatan memberikan ijin kepada **Saudari Kornelia Bernadecta Lie** untuk melakukan Kegiatan Survey/Riset untuk melanjutkan Studi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Survey/Riset dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari **tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018**.
3. Pada saat akan memulai Pekerjaan hendaknya melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Kepada Instansi / pihak yang dituju agar dapat memberikan dukungan dan arahan dalam memberikan data yang diperlukan dalam Penelitian dimaksud.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, kepada **Saudari Kornelia Bernadecta Lie**, diharapkan memberikan **Laporan Hasil Kegiatan** kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Surat Ijin Melakukan Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

**An. Bupati Kapuas Hulu,**  
Sekretaris Daerah,  
Kepala Bagian Kesatuan Bangsa  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu,

  
**WALADI KAMARSYAH, S.Sos., M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620323 198503 1 017

**Tembusan**, disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen. Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat,  
U.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Kalimantan Barat.
3. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);

## CURRICULUM VITAE

Nama : Kornelia Bernadecta Lie

Tempat / Tanggal Lahir : Putussibau / 27 Juni 1996

Janis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Pendidikan Gg. Sungai Kualo No. 07,  
Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat  
78711

*e-Mail* : Korneliabernadectalie@gmail.com

No. Hp : 082159593104

Pendidikan : 1. 2002 – 2008 SD Negeri 04 Putussibau  
2. 2008 – 2011 SMP Negeri 01 Putussibau  
3. 2011 – 2014 SMA Negeri 01 Putussibau  
4. 2014 – 2018 Universitas Brawijaya

Pengalaman Magang : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Batu



Malang, 5 Mei 2018

Kornelia Bernadecta Lie